



Katalog BPS : 1202059

# Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik 2018



BADAN PUSAT STATISTIK

# Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik 2018



# LAPORAN KINERJA BPS 2018

**No. Publikasi** : 02130.1901  
**Katalog** : 1202059  
**Ukuran Buku** : 17,6 cm x 25 cm  
**Jumlah Halaman** : xvi + 161 Halaman

**Naskah:**

Bagian Monitoring dan Evaluasi

**Gambar Kulit:**

Bagian Monitoring dan Evaluasi

**Diterbitkan Oleh:**

© Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

**Dicetak Oleh:**

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**



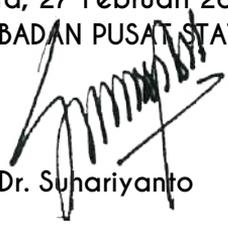
# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKIP) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja BPS sebagai salah satu penyelenggara negara. Penyusunan LKIP BPS Tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama tahun 2018.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2018, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2018. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk evaluasi agar mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Pimpinan BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

**Jakarta, 27 Februari 2019**  
**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

  
**Dr. Suhariyanto**





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	ix
Daftar Lampiran .....	xi
Ringkasan Eksekutif .....	xiii
<b>Bab I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS .....	4
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran .....	6
1.4. Potensi dan Permasalahan .....	9
1.5. Sistematika Penyajian Laporan .....	11
<b>Bab II. Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>13</b>
2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015 - 2019 .....	15
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2018 .....	20
<b>Bab III. Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>29</b>
3.1. Capaian Kinerja BPS .....	31
3.2. Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2018 dan 2019 .....	62



3.3 Capaian Kinerja BPS terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  
TA 2018 ..... 71

3.4 Prestasi Tahun 2018 ..... 81

3.5 Upaya Efisiensi BPS 2018 ..... 83

3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2018 ..... 85

**Bab IV. Penutup ..... 87**

**Lampiran ..... 91**



# DAFTAR TABEL

## Tabel

1. Pagu Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 (Miliar Rupiah) .....	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 2015-2019 .....	19
3. Target Kinerja BPS 2018 .....	20
4. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator .....	23
5. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2018 .....	31
6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data Terhadap Kualitas Data BPS Tahun 2018 .....	36
7. Capaian Kinerja IKU Presentase Pemasukan Dokumen (Response Rate) Survei Menurut Pendekatan Responden .....	42
8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Hubungan Dengan Sumber Data ( <i>respondent engagement</i> ) Tahun 2018 .....	45
9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari Tujuan Penguatan Sistem Statistik Nasional Melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif Di Bidang Statistik Tahun 2018 .....	53
10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik Tahun 2018" .....	55



11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Tahun 2018 .....	58
12. Perbandingan Realisasi Kinerja BPS Tahun 2018 dengan Target Renstra Tahun 2018 dan 2019 .....	63
13. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2018 .....	83
14. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2018 .....	84
15. Realisasi Pagu BPS menurut jenis Belanja TA 2018 (Miliar Rupiah)	85
16. Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2018 (Juta Rupiah).....	86



# DAFTAR GAMBAR

## Gambar

1. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik .....	6
2. Komposisi SDM BPS Menurut Tingkat Pendidikan .....	7
3. Nilai Inti BPS .....	18
4. Capaian Kinerja BPS Tahun 2013-2018 .....	32
5. Target dan Realisasi Indikator Persentase Konsumen yang Merasa Puas Dengan Kualitas Data Statistik Tahun 2017 dan 2018 .....	34
6. Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Delapan Dimensi Kualitas Data Statistik .....	35
7. Target dan Realisasi Indikator Persentase Konsumen yang Puas Akan Layanan Data BPS Tahun 2017 dan 2018.....	45
8. Profil Pengunjung <i>Website</i> Terdaftar Menurut Pendidikan .....	47
9. Komposisi Pengunjung <i>Website</i> Terdaftar Menurut Pekerjaan/Profesi.....	48
10. Komposisi Konsumen Menurut Pemanfaatan Data BPS Tahun 2018 .....	49
11. Target dan Realisasi Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektorial dan Khusus yang Dihimpun Tahun 2017-2018 .....	51
12. Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Tahun 2018.....	76
13. Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Tahun 2018 .....	80





# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran

1. Renstra BPS 2015 - 2019 .....	93
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik 2018 .....	97
3. Pengukuran Capaian Kinerja 2018 .....	101
4. Perubahan Tingkat Blok Sensus Menurut Provinsi Tahun 2018.....	107
5. Perubahan Wilayah Tingkat Desa Menurut Provinsi Tahun 2018.....	109
6. Perubahan Wilayah Tingkat Kec. Menurut Prov Tahun 2018.....	111
7. ARC Publikasi BPS Tahun 2018 .....	113
8. Pelaksanaan ARC Tahun 2018 .....	123
9. Pernyataan Perubahan Target PK Terhadap Renstra .....	129
10. Jumlah Pejabat Fungsional Badan Pusat Statistik Tahun 2018.	131
11. Jumlah Pegawai BPS .....	135
12. Prestasi yang diraih BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2018.....	141
13. Pemberitaan Tentang Angka Produksi Padi BPS RI Tahun 2018	155
14. Penilaian dari ODW terhadap OfficialStatistics Dunia .....	157
15. Penghargaan Penghematan Energi.....	159
16. Pernyataan Telah Di Reviu.....	161





# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS pada Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS 2015-2019.

Secara umum kinerja BPS tahun 2018 dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 112,04 persen naik dibandingkan tahun 2017 sebesar 110,79 persen. Capaian sasaran strategis tahun 2018 sebesar 105,57 persen lebih baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 91,38 persen. Dari sisi pelayanan BPS terhadap pengguna data menunjukkan peningkatan, di tahun 2018 konsumen yang puas akan layanan data BPS sebesar 98,11 persen, meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 91,14 persen. Namun tingkat konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik turun menjadi sebesar 96,96 persen dibanding capaian tahun 2017 sebesar 99,61 persen. Hal ini menjadi salah satu tantangan BPS di tahun berikut untuk meningkatkan kembali kualitas data yang disajikan.

Upaya BPS untuk semakin memudahkan akses data bagi para pengguna juga membuahkan hasil. Sebanyak 96,72 persen konsumen data merasa puas terhadap akses data BPS meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 94,51 persen. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS di tahun 2018 sebanyak 2,32 juta atau mengalami peningkatan sebesar 25,48 persen dibandingkan tahun 2017 sebanyak 1.73 juta pengunjung.



Di sisi lain, pemanfaatan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi oleh pengguna data persentasenya masih relatif kecil 24,45 persen, serta menurun dibandingkan tahun 2017. Dengan kondisi seperti ini, sangat diperlukan upaya yang luar biasa agar pengguna data mendapatkan kepastian dan ketepatan waktu mendapatkan data dan informasi yang dihasilkan BPS.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada tahun 2018 BPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.777,88 miliar dengan realisasi sebesar Rp 4.354,92 miliar (91,15 persen). Realisasi anggaran ini meningkat jika dibandingkan tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 3.989,98 miliar dan realisasi Rp. 3.625,01 miliar rupiah (90,85 persen). Bila dibandingkan dengan capaian kinerja baik kinerja tujuan maupun kinerja sasaran strategis dapat dikatakan BPS telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Hal yang sama terjadi pada pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BPS. Masing-masing program dan kegiatan tersebut memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggarannya.

Di tahun 2018, kinerja BPS juga mendapatkan apresiasi dari Presiden dan Wakil Presiden RI khususnya dengan dirilisnya data produksi padi menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang menggunakan teknologi spasial hasil kerjasama BPS dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPS), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Dengan dirilisnya data tersebut maka polemik data produksi padi yang telah terjadi lebih dari 20 tahun dapat diakhiri dan Presiden RI juga menyampaikan bahwa ke depan data BPS menjadi acuan pengambilan kebijakan pemerintah. Satuan kerja BPS di daerah juga banyak sekali yang mendapatkan penghargaan dari instansi luar sebagai hasil kerja keras yang dilakukan selama 2018. Tahun 2018 BPS mendukung 2 (dua) program prioritas nasional yaitu "Pengembangan dunia



usaha dan pariwisata” serta “Ketahanan Pangan”. Rata-rata capaian kinerja kedua program prioritas tersebut telah berhasil memenuhi target.







**BAB I**

**PENDAHULUAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional
- Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia

Sebagai Lembaga Pemerintah yang anggarannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka BPS wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pemangku Kepentingan. Laporan Kinerja disusun mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama Tahun 2018.

## 1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik adalah menyelenggarakan statistik dasar. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BPS menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan sistem statistik nasional;



5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehormatan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, kewenangan yang dimiliki BPS adalah:

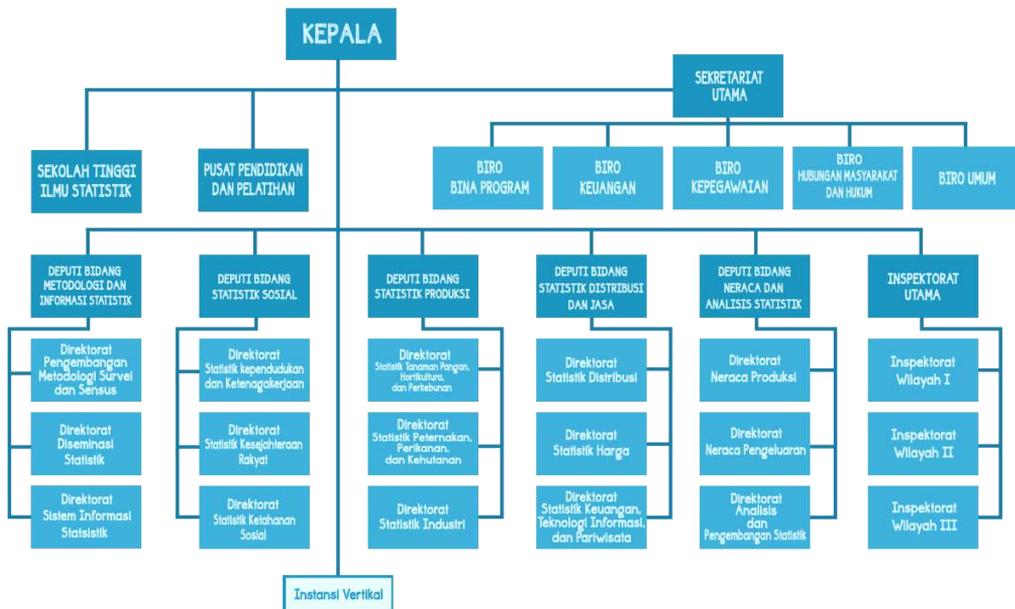
1. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya;
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi dibidangnya;
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kegiatan statistik;
  - b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS dan diperbaharui dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, serta Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat Utama
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
4. Deputi Bidang Statistik Sosial
5. Deputi Bidang Statistik Produksi
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa



7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
8. Inspektorat Utama
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
10. Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Poltek Statistika STIS)
11. Instansi Vertikal (BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota)



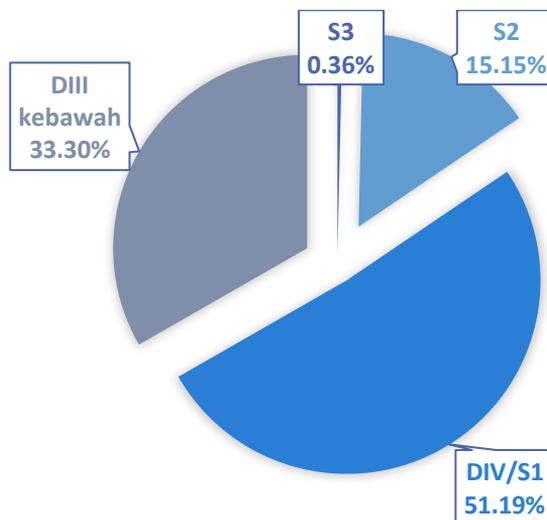
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik

### 1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, BPS telah ditunjang oleh sumber daya manusia yang memadai. Jika dilihat pada Gambar 2, kualitas SDM BPS relatif baik. Dari total 15.534 pegawai, persentase SDM yang berpendidikan DIII sebesar 33,30 persen, DIV/S1 sebesar 51,19 persen, berpendidikan S2 sebesar 15,15 persen, dan S3 sebesar 0,36 persen. Proporsi SDM yang berpendidikan DIII ke bawah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar 34,69 persen. Penurunan tersebut diikuti dengan kenaikan komposisi



SDM yang berpendidikan DIV/S1, S2 maupun S3. Di tahun 2017, SDM berpendidikan DIV/S1 sebesar 51,57 persen, S2 sebesar 15,15 persen dan S3 sebesar 0,31 persen. Hal ini dapat diartikan sebagai hasil dari peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan. Selain mendidik calon pegawai melalui Politeknik Statistika STIS yang merupakan sekolah kedinasan milik BPS, peningkatan juga dilakukan melalui aktivitas Rintisan Pendidikan Gelar dengan cara memberi kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat S2 dan S3 melalui jalur Tugas Belajar ataupun dengan memberikan ijin belajar bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan dengan biaya mandiri.



**Gambar 2. Komposisi SDM BPS Menurut Tingkat Pendidikan**

Selain dari sisi pendidikan, peran jabatan fungsional juga semakin ditingkatkan. Tercatat sebanyak 4.076 pegawai atau sebesar 26,24 persen pegawai menduduki jabatan fungsional tertentu, meningkat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 3.717 pegawai atau mengalami kenaikan sebesar 9,66 persen. Dari seluruh pejabat fungsional tertentu yang dimiliki BPS sebesar 92,35 persen merupakan pejabat fungsional statistisi dengan rincian 2.006 pegawai merupakan statistisi tingkat terampil dan 2.070 pegawai merupakan statistisi tingkat ahli. Telah terjadi kenaikan jumlah statistisi tingkat ahli bila dibandingkan dengan tahun 2017 (2017=1.417 pegawai).

Sejak Tahun 2017 BPS telah memiliki 1 (satu) orang pejabat fungsional statistisi ahli utama serta di tahun 2018 BPS juga sudah memiliki Widyaiswara Utama sebanyak 1 orang. Secara khusus dari 2.070 statistisi tingkat ahli, sebanyak 1.149 pegawai merupakan Statistisi Ahli Pertama, 603 pegawai merupakan Statistisi Ahli Muda, 48 pegawai merupakan Statistisi Ahli Madya dan 1 pegawai merupakan Statistisi Ahli Utama. Peningkatan pegawai yang menduduki jabatan fungsional diantaranya merupakan hasil program impasing bagi pegawai serta meningkatnya minat pegawai untuk menjadi pejabat fungsional.

Pada tahun 2018, BPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.777,88 miliar. Pagu tersebut dibagi ke dalam satu program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 1.740,60 miliar dan tiga Program non teknis/generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp 2.775,60 miliar, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) sebesar Rp 247,87 miliar, dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) sebesar Rp 13,79 miliar. Rincian Pagu anggaran BPS tahun 2018 menurut program dan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Pagu Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 (Miliar rupiah)

Program / Sumber Dana	Hibah Langsung Dalam Negeri	Hibah Langsung Luar Negeri	Pinjaman Luar Negeri	Penerimaan Non Pajak	Rupiah Murni	Rupiah Murni Pendamping	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 DMP TTL			-	9.020	2,766.585	-	2,775.605
02 PSPA			-		247.874	-	247.874
03 PPAA			-		13.793	-	13.793
04 PPS	0.200	4.072	-	28.890	1,707.443	-	1,740.605
<b>Total</b>	<b>0.200</b>	<b>4.072</b>	<b>-</b>	<b>37.910</b>	<b>4,735.695</b>	<b>-</b>	<b>4,777.877</b>

#### 1.4. Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan *National Statistics Office* (NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya.

Peran BPS sebagai lembaga statistik pemerintah telah ditopang oleh Politeknik Statistika STIS yang telah menghasilkan mahasiswa ahli statistik untuk memenuhi kebutuhan pegawai BPS serta rekrutmen pegawai yang tidak hanya ahli statistik tetapi juga bidang lain seperti teknologi informasi, ekonomi, hukum dsb. Dalam melaksanakan tugasnya BPS juga memiliki *Core Value* "PIA"; Profesional, Integritas dan Amanah yang telah tertanam pada diri pegawai BPS. *Core Value* ini yang telah menjadikan semangat insan BPS untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna data dasar.

Peran BPS semakin meningkat dan diakui oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun pihak luar negeri. Instansi/Kementerian semakin banyak yang bekerja sama dengan BPS untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa data BPS semakin dipercaya. Namun disisi lain, BPS harus lebih meningkatkan peran sebagai pembina statistik sektoral bagi kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah. Terlebih bahwa Pemerintah Daerah sudah memiliki satuan perangkat pemerintah daerah urusan Komunikasi, Informasi dan Statistik. BPS harus berkoordinasi, bekerja sama dengan berbagai pihak melalui forum satu data.

Selain peningkatan peran BPS sebagai pembina urusan statistik, permasalahan yang dihadapi BPS adalah bagaimana cara untuk meningkatkan serta mempertahankan kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna data. Walaupun data tingkat kepuasan pengguna data BPS sudah menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi namun harus tetap senantiasa memunculkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan mutakhir. Prosedur penjaminan kualitas harus dapat diterapkan disemua kegiatan BPS secara bertahap, penerapan teknologi informasi sehingga data semakin cepat tersaji dan meminimalkan *error/kesalahan* data. Era Big Data tidak mungkin dihindari, oleh sebab itu BPS harus dapat mengikuti dan menggunakan data perkembangan global yang sangat cepat dengan menerapkan perangkat teknologi yang efisien, efektif serta ekonomis.

Disisi lain, semakin banyak survei yang dilakukan BPS konsekuensinya adalah responden yang enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Kunjungan yang berulang pada satu responden untuk berbagai survei dapat membuat responden bosan dan bahkan menolak untuk didata. Untuk itu BPS mengarah pada integrasi survei melalui program Statcap Cerdas yang bertujuan untuk menjadikan BPS yang lebih efektif, efisien dan ekonomis dengan hasil akhir yang ingin dicapai adalah data yang digunakan BPS semakin kredibel, andal dan memberi manfaat bagi semua user. data.



## 1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BPS Tahun 2018 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia dan dukungan anggaran BPS, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2018.
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS, Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2018 dan 2019, Capaian Kinerja BPS terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, Prestasi tahun 2018, Upaya Efisiensi BPS 2018, dan Realisasi Anggaran tahun 2018.
- Bab IV. **Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. BPS turut berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik. Visi yang disusun BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:

**“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”**

**“Pelopor”** mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. **“Data statistik yang terpercaya”** yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. **“Untuk semua”** dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:





## Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (Perpres No.86 tahun 2007). Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan.

Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*. Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU No. 16 Tahun 1997).

Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*.



## Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu



diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan” (UU No. 16 Tahun 1997). Di dalam undang-undang tersebut, BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b. Pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e. Pengembangan sistem informasi statistik;
- f. Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
- g. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;

- h. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

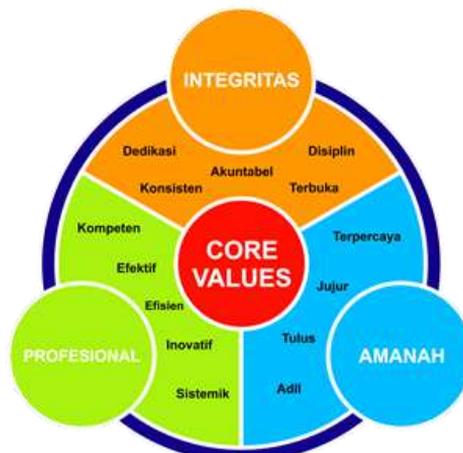
- a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik.

### 3

#### Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.



Gambar 3. Nilai Inti BPS

Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran didalam melaksanakan kegiatan statistik.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS 2015-2019**

TUJUAN (1)	SASARAN STRATEGIS (2)
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	SS1.2. Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4.1. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik
	SS4.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS4.3. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	SS4.4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

## 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2018

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penandatanganan PK oleh Kepala BPS dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018.

**Tabel 3. Target Kinerja BPS 2018**

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)
<b>1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas</b>		
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85,00
<b>1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS</b>		
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85,00
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100,00
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	90,00
Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	Aktivitas	21
Jumlah Publikasi /Laporan Statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi	198
Jumlah <i>Release</i> data Statistik yang tepat waktu	Aktivitas	28

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Target
(1)		(2)	(3)
	Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	23
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei	Persen	97,00
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	99,00
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha	Persen	92,00
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	97,00
<b>1.2 Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas</b>			
	Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas	Aktivitas	4
<b>2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</b>			
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	86,00
<b>2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)</b>			
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Pengunjung	1.400.000
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	30,00
	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	86,00
<b>3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik</b>			
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	400
<b>3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN</b>			
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	400

Tujuan/Sasaran/Indikator		Satuan	Target
(1)		(2)	(3)
	Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Instansi	6
	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	Instansi	6
<b>4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</b>			
	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
<b>4.1 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik</b>			
	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	Persen	70,00
	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	Persen	70,00
	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	Persen	30,00
<b>4.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b>			
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Point	78,00
	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Point	76,00
	Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	Persen	84,00
<b>4.3 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan</b>			
	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
<b>4.3 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan</b>			
	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80,00
	Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	100,00
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS kepada Presiden atas penggunaan anggaran BPS.

Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Karena itu setiap unit kerja mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja BPS. Peranan unit kerja Eselon I pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator**

Tujuan/Sasaran/Indikator		Sestama	Kedeputian MIS	Kedeputian Sos	Kedeputian Prod	Kedeputian Disias	Kedeputian NAS	Inspektorat
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas								
	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		*	*	*	*	*	
1.1 Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS								
1.1.1	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		*	*	*	*	*	
1.1.2	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS		*					
1.1.3	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama		*	*	*	*	*	
1.1.4	Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi		*	*	*	*	*	
1.1.5	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu		*	*	*	*	*	

Tujuan/Sasaran/Indikator		Sesama	Kedeputian MIS	Kedeputian Sos	Kedeputian Prod	Kedeputian Disias	Kedeputian NAS	Inspktorat
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.6	Jumlah <i>release</i> data Statistik yang tepat waktu		*	*	*	*	*	
1.1.7	Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu		*	*	*	*	*	
1.1.8	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei			*	*	*	*	
1.2 Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas								
1.2.1	Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas						*	
Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik								
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS		*					
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)								
2.1.1	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website		*					
2.1.2	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional		*					
2.1.3	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS		*	*	*	*	*	
Tujuan 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik								
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun		*					
3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN								
3.1.1	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun		*					
3.1.2	Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik		*					
3.1.3	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi		*					

Tujuan/Sasaran/Indikator		Sesama	Kedeputian MIS	Kedeputian Sos	Kedeputian Prod	Kedeputian Disias	Kedeputian NAS	Inspektorat
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel								
	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	*						*
4.1 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik								
4.1.1	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	*						
4.1.2	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	*						
4.1.3	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	*						
4.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS								
4.2.1	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	*						*
4.2.2	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	*	*	*	*	*	*	*
4.2.3	Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	*						*
4.3 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan								
4.3.1	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	*						*
4.4 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS								
4.4.1	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	*						
4.4.2	Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	*						
4.4.3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	*						

Keterangan:   : Penanggung Jawab

\* : Kontributor

### Sasaran 1.1 “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”

Pada tabel 4 terlihat bahwa seluruh kedeputian bertanggung jawab terhadap tujuan 1 yaitu “Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas” dengan indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik”. Seluruh kedeputian bertanggungjawab terhadap 3 (tiga) indikator yang berada pada sasaran 1.1 yaitu indikator 1.1.1, 1.1.3 dan 1.1.5. Indikator 1.1.2 yaitu “Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS” penanggung jawabnya adalah kedeputian MIS. Ada 2 (dua) indikator yaitu 1.1.4 dan 1.1.6 kedeputian MIS merupakan penunjang dan indikator 1.1.7 kedeputian MIS dan NAS sebagai penunjang.

### Sasaran 1.2 “Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas”

Penanggungjawab indikator 1.2.1 yaitu “Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas” adalah kedeputian NAS.

### Sasaran 2.1 “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)”

Tiga indikator pada sasaran ini yaitu 2.1.1, 2.1.2 dan 2.1.3 merupakan tanggungjawab kedeputian MIS karena berhubungan dengan teknologi informasi dan penyajian data. Untuk indikator 2.1.3 seluruh kedeputian ikut sebagai penunjang.

### **Sasaran 3.1 “Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN”**

Sama seperti pada sasaran 2.1, 3 (tiga) indikator pada sasaran ini yaitu 3.1.1, 3.1.2 dan 3.1.3 merupakan tanggungjawab kedeputian MIS karena berhubungan dengan penyajian dan konsultasi data.

### **Sasaran 4.1 “Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik”**

Ke-3 indikator pada sasaran “Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik” yaitu 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.3 merupakan tanggungjawab Kesestamaan karena berhubungan dengan kompetensi pegawai dan jabatan fungsional.

### **Sasaran 4.2 “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”**

Dua indikator pada sasaran “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” yaitu indikator 4.2.1 dan 4.2.2 merupakan tanggungjawab Kesestamaan karena berhubungan dengan penyelenggaraan SAKIP dan RB. Untuk indikator 4.2.1 yaitu “Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB” ditunjang oleh Irtama sedangkan indikator 4.2.2 yaitu “Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB” ditunjang oleh seluruh eselon I BPS. Indikator 4.2.3 yaitu “Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)” merupakan tanggungjawab Irtama yang ditunjang oleh Kesestamaan.

### Sasaran 4.3 “Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan”

Indikator 4.3.1 yaitu “Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK” merupakan tanggungjawab Kesestamaan karena berhubungan dengan laporan keuangan dan ditunjang oleh Irtama. Dalam penilaian kinerja indikator, kategori opini BPK terhadap laporan keuangan diberikan skor sebagai berikut:

- Tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer*) skor 25
- Tidak Wajar skor 50
- Wajar Dengan Pengecualian skor 75
- Wajar Tanpa Pengecualian skor 100

Target BPS adalah Wajar Tanpa Pengecualian (Skor=100)

### Sasaran 4.4 “Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS”

Ketiga indikator pada sasaran “Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS” yaitu 4.4.1, 4.4.2 dan 4.4.3 merupakan tanggungjawab Kesestamaan karena berhubungan dengan penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BPS.



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



# BAB III

## AKUNTABILITAS

### KINERJA



#### 3.1 Capaian Kinerja BPS

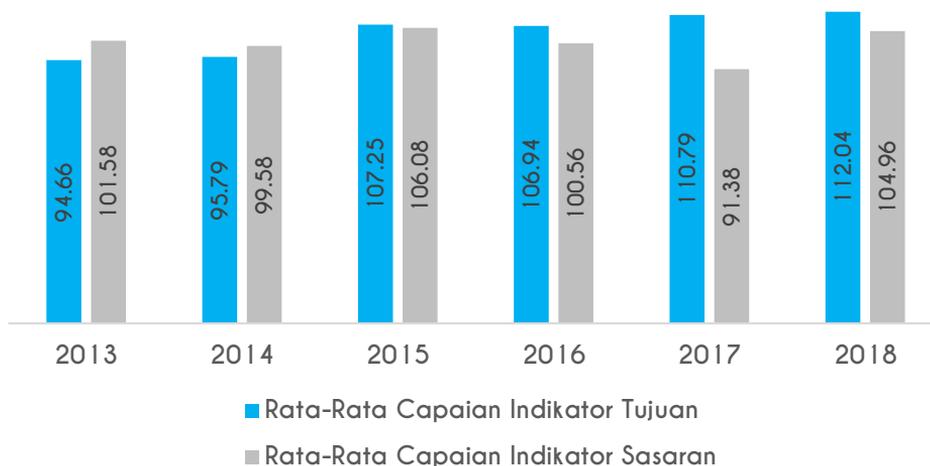
Capaian kinerja BPS Tahun 2018 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama 1 (satu) tahun. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.

**Tabel 5. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2018**

Tujuan/Sasaran/Indikator (1)	Jumlah Indikator (2)	Capaian Kinerja (%) (3)
<b>1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas</b>	1	114,07
1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	8	101,93
1.2 Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas	1	100,00
<b>2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</b>	1	114,08
2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	3	104,08
<b>3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik</b>	1	120,00
3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	3	120,00

Tujuan/Sasaran/Indikator (1)	Jumlah Indikator (2)	Capaian Kinerja (%) (3)
<b>4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</b>	1	100,00
4.1 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	3	107,82
4.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	3	106,05
4.3 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	1	100,00
4.4 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	3	102,76
<b>Rata Rata Tujuan</b>		<b>112,04</b>
<b>Rata Rata Sasaran</b>		<b>105,57</b>

Hasil monitoring capaian kinerja menunjukkan rata-rata Kinerja Tujuan BPS pada tahun 2018 sebesar 112,04 persen naik dibandingkan capaian kinerja tujuan tahun 2017 sebesar 110,79 persen. Rata-rata Kinerja sasaran juga naik menjadi 105,57 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 91,38 persen. Keadaan Capaian kinerja BPS untuk kurun waktu 2013-2018 dapat dilihat pada Gambar 4.

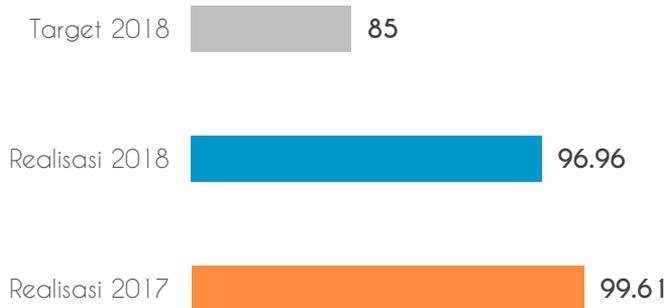


Gambar 4. Capaian Kinerja BPS Tahun 2013-2018

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data BPS tidak jarang mendapat kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data BPS mengindikasikan bahwa kualitas data BPS masih perlu ditingkatkan. Agar kualitas data BPS semakin meningkat maka peran kerangka penjaminan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan statistik semakin ditingkatkan.

Keberhasilan tujuan BPS dalam aspek kualitas data diukur melalui satu IKU yaitu indikator "Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik". Pengukuran indikator tersebut dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Hasil SKD menunjukkan bahwa 96,96 persen konsumen merasa puas terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan BPS. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 85,00 persen, kinerja BPS untuk tujuan pertama telah tercapai dengan nilai capaian sebesar 114,07 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, konsumen yang merasa puas sebesar 99,61 persen sehingga kinerja BPS untuk tujuan ini mengalami penurunan sebesar 2,65 persen. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan metode penghitungan dalam survei SKD tahun 2018. Upaya yang dilakukan BPS untuk meningkatkan kualitas data diantaranya memperbaiki metodologi pengumpulan data seperti penggunaan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk mengumpulkan data produksi padi dari yang semula menggunakan metode *Eye Estimate*, mulai digunakannya

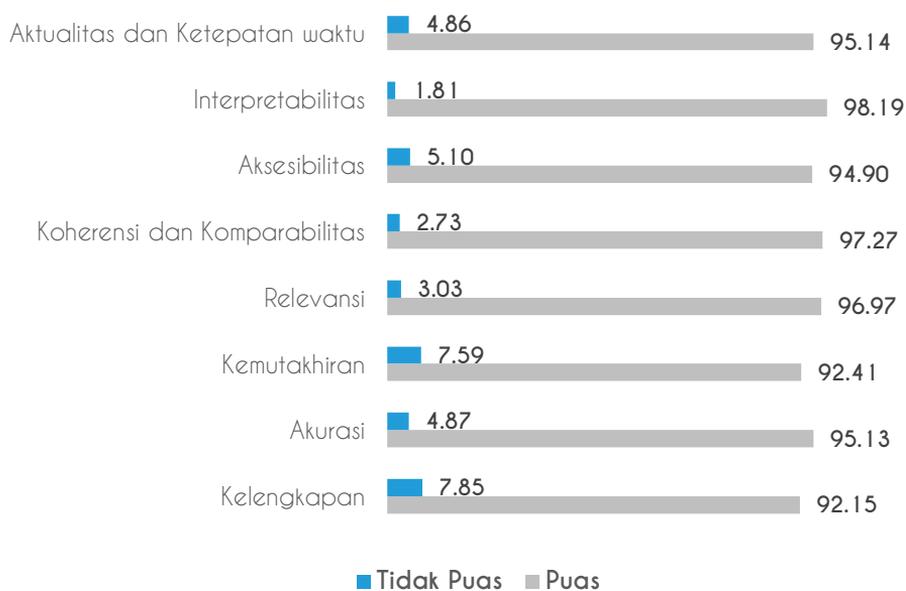
metode CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) pada beberapa survei sehingga isian data dapat divalidasi dari awal pencacahan.



**Gambar 5. Target dan Realisasi Indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” Tahun 2017 dan 2018**

Pengukuran kepuasan terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan, dilakukan terhadap 8 (delapan) dimensi yaitu kelengkapan, akurasi, kemutakhiran, relevansi, koherensi, aksesibilitas, intrepretabilitas dan aktualitas. Persentase kepuasan konsumen data terhadap kedelapan dimensi tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.





**Gambar 6. Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap 8 (delapan) Dimensi Kualitas Data Statistik**

Tujuan pertama dicapai dengan 2 (dua) sasaran strategis, dengan penjelasan sebagai berikut:

### **SS1.1. Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data terhadap kualitas data BPS**

SS1.1. diukur melalui 8 (delapan) IKU. Rata-rata capaian kinerja SS1.1. sebesar 101,93 persen. Dari 8 (delapan) indikator pada sasaran ini, terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya tidak sesuai target yaitu indikator ketiga “Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama” dan indikator kelima “Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu” sedangkan 6 (enam) indikator lainnya sudah sesuai atau melampaui target.

## Persentase Konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Indikator pertama yaitu “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” memiliki capaian paling tinggi yaitu 114,07 persen. Sedangkan indikator kelima “Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu” merupakan indikator yang capaiannya paling rendah yaitu 92,42 persen. Untuk indikator-indikator yang capaiannya jauh melampaui target perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi agar penentuan target tidak terlalu rendah sedangkan indikator yang capaiannya di bawah 95 persen perlu upaya yang lebih besar untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Target dan pencapaian setiap indikator Tahun 2018 serta perbandingan terhadap realisasi tahun 2017 pada masing-masing IKU dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data terhadap kualitas data BPS” Tahun 2018**

IKU (1)	Target 2018 (2)	Realisasi 2018 (3)	Capaian 2018 (%) (4)	Capaian 2017 (%) (5)	Perubahan (%) (6)
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	85	96,96	114,07	117,18	-3,11
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100	100,	100,00	100,00	0
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	90	88,82	98,69	97,72	0,97
Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	21	21	100,00	100,00	0

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)	Capaian 2017 (%)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu	198	183	92,42	73,93	18,49
Jumlah <i>release</i> data Statistik yang tepat waktu	28	31	110,71	84,38	17,33
Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	23	23	100,00	96,23	3,77
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei	97,00	96,99	99,51	97,11	2,4
<b>Rata rata Capaian Kinerja</b>			<b>101,93</b>	<b>95,30</b>	<b>6,63</b>

Indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” selain merupakan indikator dari tujuan pertama, juga merupakan indikator pertama dari SS1.

### Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Salah satu syarat utama untuk menyelenggarakan kegiatan survei yang baik adalah tersedianya kerangka sampel yang lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pemeliharaan kerangka sampel secara berkelanjutan dengan cara melakukan pemutakhiran baik dari sisi muatan blok sensus maupun dari sisi perubahan wilayah. Muatan blok sensus yang dimutakhirkan selain jumlah rumah tangga, juga informasi tentang beberapa variabel rumah tangga yang diperlukan untuk kepentingan survei. Sedangkan perubahan wilayah mencakup perubahan batas, nama, dan kode dari suatu wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan blok sensus.

Hingga akhir tahun 2018 pemutakhiran data Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS) telah memenuhi target yang ditetapkan. Tercatat kejadian pemutakhiran pada tingkat blok sensus dilakukan sebanyak 18.188 perubahan, sedangkan kejadian pemutakhiran pada wilayah tingkat kecamatan sebanyak 25 perubahan dan kejadian pemutakhiran pada wilayah tingkat desa sebanyak 734 kali. Data pemutakhiran MFD dan MBS menurut provinsi dapat di lihat pada Lampiran 4.

### **Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama**

Sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang bertugas menghasilkan data statistik, sudah sewajarnya jika masyarakat menjadikan BPS rujukan utama dalam mencari informasi statistik. Hal tersebut tercermin dari hasil SKD yang menunjukkan sebanyak 88,82 persen konsumen menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Dengan demikian capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut mencapai 98,69 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang sebesar 97,72 persen, naik sebesar 0,97 persen. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian BPS sebagai rujukan utama dalam mencari informasi diantaranya adalah masih perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada semua lapisan masyarakat terutama ragam data yang dihasilkan BPS sehingga ketika pengguna data mencari data sudah mengetahui ragam data yang sudah ada di BPS sehingga mereka akan langsung mencarinya di BPS atau menjadi rujukan utama. Langkah kedepan BPS harus lebih mampu memberikan jaminan peningkatan kualitas, pemutakhiran data serta ketepatan waktu penyajian data sehingga para pengguna data akan menggunakan data BPS sebagai rujukan utama ketika mereka merencanakan/melakukan evaluasi.

## Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi

Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi pada Tahun 2018 sebanyak 21 aktivitas, ini sesuai target di dokumen PK Tahun 2018. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan tahun 2017 dengan realisasi sebanyak 19 aktivitas. Kenaikan ini disebabkan oleh keinginan BPS untuk meyakinkan pengguna data tentang akurasi sehingga data BPS lebih dipercaya dan banyak digunakan oleh pengguna data.

## Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu & Jumlah Rilis data Statistik yang tepat waktu

Dalam rangka menyampaikan informasi dan data statistik yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara tepat kepada para pengguna data, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program *Advance Release Calendar* (ARC). Program ini menyediakan informasi jadwal penerbitan semua produk BPS yang di dalamnya mencakup periodisitas dan tenggang waktu yang ditayangkan dalam *website* BPS.

Maksud dan tujuan penyusunan ARC BPS antara lain:

1. Menjamin terwujudnya seri publikasi BPS yang baik, dengan frekuensi penerbitan yang terjadwal dengan baik agar lebih akuntabel dan tidak bersifat *adhoc*.
2. Mengontrol agar publikasi BPS dapat diterbitkan secara konsisten dan *Subject Matter* terkait dapat memenuhi jadwal penerbitan sesuai dengan yang direncanakan.
3. Memberikan informasi kepada publik (pengguna data BPS) mengenai publikasi apa saja yang akan diterbitkan, melalui tayangan dalam *website* BPS.
4. Memberikan kepastian pada publik (pengguna data BPS) mengenai ketersediaan data dan periodisitas data BPS.

5. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas setiap unit kerja di lingkungan BPS, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program ARC BPS.

ARC BPS menurut jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu ARC Publikasi dan ARC Berita Resmi Statistik (BRS). Sebagaimana pada tujuan Program ARC kelima maka data pada ARC menjadi rujukan untuk mengukur 2 (dua) IKU BPS yaitu “Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu” dan “Jumlah Rilis data Statistik yang tepat waktu”.

Sebanyak 198 publikasi ditargetkan terbit sesuai jadwal pada tahun 2018, pada kenyataannya hanya 183 publikasi (92,42 persen) yang dapat memenuhi target tersebut. Realisasi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 73,93 persen, artinya terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 18,49 poin. Beberapa publikasi terlambat rilis dari jadwal yang telah ditargetkan yang disebabkan karena beban pekerjaan *subject matter* yang tinggi sehingga tidak semua data dapat disajikan tepat waktu. Kedepan *subject matter* harus memperbaiki manajemen pekerjaan dan manajemen waktu sehingga tidak lagi terlambat menyajikan datanya.

Pada awal tahun 2018 ditargetkan *release* data statistik sebanyak 28 kali, pada pelaksanaannya *release* data diselenggarakan tepat waktu dilakukan sebanyak 31 kali dengan kata lain capaian kinerja indikator “Jumlah rilis data statistik yang tepat waktu” mencapai 110,71 persen. Untuk informasi yang lebih lengkap, daftar publikasi yang diterbitkan serta data yang *release* pada tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 7 dan 8.

## Jumlah Publikasi/Laporan Sensus yang Terbit Tepat Waktu

Tahun 2018 masih merupakan rangkaian penyusunan publikasi/laporan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 berupa analisis hasil pencacahan sampel. Pada tahun ini ditargetkan sebanyak 28 publikasi/laporan dan dapat diselesaikan sesuai target, dengan kata lain capaian indikator kinerja untuk indikator jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu sebesar 100 persen. Capaian tahun 2018 lebih baik daripada capaian tahun 2017, target di tahun 2017 sebanyak 53 dan realisasi 51 publikasi/laporan (96,23 persen).

## Persentase Pemasukan Dokumen (Response Rate) Survei

Berbagai permasalahan yang dihadapi BPS saat ini pada akhirnya memungkinkan beberapa data dan informasi statistik yang dihasilkan dinilai kurang berkualitas, sehingga para pengguna data kurang puas terhadap produk BPS. Salah satu penyebabnya adalah adanya kecenderungan masyarakat menjadi enggan dan menolak untuk menjadi responden BPS (nonrespon), terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan elit. Nonrespon merupakan salah satu masalah dalam survei maupun sensus yang dapat mengakibatkan bias non respon dalam estimasi survei. Nonrespon unit adalah hasil dari kegagalan dalam memperoleh respon pada semua item kuesioner dari unit-unit sampel. Adanya bias nonrespon merupakan ancaman terhadap validitas dan reliabilitas suatu penelitian, terutama bila tingkat nonresponnya cukup tinggi.

Tabel 7. Capaian Kinerja IKU “Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei menurut pendekatan responden

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018 (%)	Realisasi 2017 (%)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan rumah tangga	99	98,08	99,33	94,48	0,32
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan usaha	92	92,83	100,83	86,71	6,12
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	97	96,58	98,99	90,49	6,09
<b>Rata rata Capaian Kinerja</b>			<b>99,51</b>		

Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga pada tahun 2018 sebesar 98,08 persen. Besaran ini lebih rendah bila dibandingkan dengan targetnya yang sebesar 99 persen, tetapi lebih tinggi realisasi tahun 2017 yang hanya sebesar 97,76 persen. Hambatan yang pada pengumpulan data dengan pendekatan rumah tangga adalah sulitnya responden ditemui khususnya di perumahan-perumahan elite.

Masalah lainnya adalah beban responden yang terlalu besar (karena jumlah survei yang terlalu banyak, dan kuesioner yang terlalu panjang), pertanyaan yang sulit dipahami, kurangnya kecakapan petugas, hingga kurangnya sosialisasi. Masalah tersebut perlu penanganan segera supaya responden akan merasa nyaman untuk didatangi dan dapat memberikan data sesuai harapan.

Target pemasukan dokumen untuk survei dengan pendekatan usaha pada Tahun 2018 sebesar 92 persen, dengan realisasi sebesar 92,83 persen, capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 100,83 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 90,32 persen terjadi kenaikan sebesar 2,51 persen. Beberapa hambatan yang sampai saat ini ditemui adalah sulitnya responden memberikan jawaban dengan alasan tidak ada kewenangan memberikan data.

Target pemasukan dokumen survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha pada tahun 2018 sebesar 97 persen dan berhasil dipenuhi dengan realisasi sebesar 96,58 persen atau capaian kinerjanya sebesar 98,99 persen.

## **SS2. 1.: Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas**

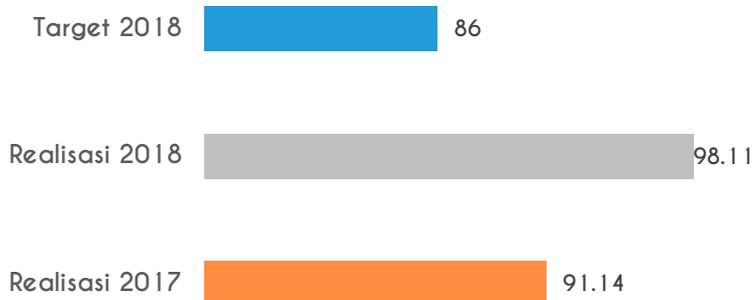
### **Jumlah aktivitas statistik yang mendeklarasikan penjaminan kualitas**

Indikator “Jumlah aktivitas statistik yang mendeklarasikan penjaminan kualitas” menggambarkan jumlah kegiatan statistik yang mengumumkan informasi terkait penjaminan kualitas. Capaian indikator ini pada Tahun 2018 adalah 100 persen, dari target yang ditetapkan sebanyak 4 aktivitas lebih banyak dari tahun 2017 sebanyak 2 aktivitas.

Sebagai salah satu agen pemerintah yang ditugaskan untuk mengumpulkan data makro dan data mikro, BPS mempunyai konsumen utama berupa Kementerian/Lembaga dan dunia usaha serta masyarakat. Berbagai pendekatan dan sistem telah diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima untuk pengguna data statistik tanpa membedakan (diskriminatif) terhadap semua pihak. Peningkatan kualitas pelayanan mencakup penyempurnaan pelayanan statistik, pembuatan *advanced release calendar*, dan pengembangan perpustakaan sesuai situasi daerah. Selain itu, BPS juga terus menyempurnakan situs *website* BPS dan menambah muatan data yang di *upload* supaya pengguna data dapat memperoleh data yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan murah.

Pengukuran pencapaian BPS dalam rangka mencapai tujuan “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik,” dinilai melalui satu indikator yaitu “Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS”. Sebagaimana indikator sebelumnya yang terkait dengan konsumen, untuk mendapatkan besaran datanya diperoleh melalui Survei Kebutuhan Data (SKD).

Hasil SKD menunjukkan persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS pada tahun 2018 mencapai 98,11 persen sedangkan targetnya sebesar 86 persen artinya capaian kinerja indikator ini mencapai 114,08 persen. Persentase konsumen yang puas akan layanan BPS di tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 91,14 persen.



**Gambar 7. Target dan Realisasi Indikator “Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS” tahun 2017 dan 2018**

Tujuan kedua dicapai melalui satu sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)”, dengan pengukuran keberhasilannya dinilai oleh 3 (tiga) IKU. Pada tahun 2018 kinerja sasaran tersebut berhasil dicapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,66 persen. Data dan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian masing-masing indikator dari sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 dan penjelasan di bawah ini.

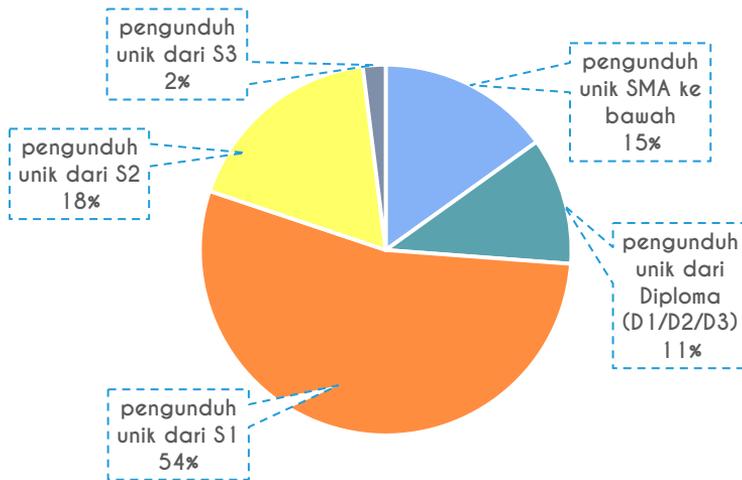
**Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*) Tahun 2018**

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	1.400.000	2.322.354	120,00	1.727.450	34,43
Persentase konsumen yang	30	24,45	81,50	9,24	15,21

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional					
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	86	98,11	114,08	94,51	3,6
<b>Rata rata Capaian Kinerja /Perubahan</b>			<b>105,19</b>		

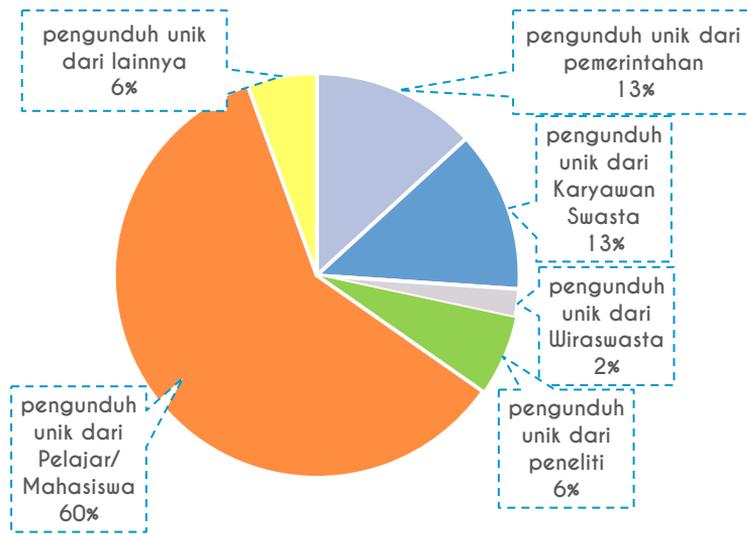
### Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website*

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) pada tahun 2018 mencapai 2.322.354 pengunjung jauh lebih banyak dibandingkan pengunjung tahun 2017 sebanyak 1.727.450 pengunjung, juga jauh lebih besar dari target PK yang sebanyak 1.400.000 pengunjung. Hal ini menandakan bahwa kedepan BPS harus meningkatkan target pengunjung *website* BPS dikarenakan capaian 2018 yang sangat tinggi. Peningkatan jumlah pengunjung eksternal ini merupakan hasil dari beberapa strategi yang dilakukan BPS seperti sosialisasi kegiatan maupun *website* BPS melalui media sosial. Selain itu, BPS juga senantiasa membina hubungan baik dengan media massa, utamanya pada saat kegiatan rilis data maupun penjelasan data-data pemerintah. Dengan semakin seringnya BPS muncul dalam pemberitahuan media massa diharapkan semakin banyak lapisan masyarakat yang mengetahui dan mengakses data BPS melalui *website*.



**Gambar 8. Profil Pengunjung *Website* Terdaftar Menurut Pendidikan**

Pengunjung *website* dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu terdaftar dan tidak terdaftar. Komposisi pengunjung terdaftar adalah pengunjung yang mendaftarkan diri ketika akan mengunduh data BPS. Pengunjung terdaftar mendapat fasilitas untuk mengunduh berbagai file yang tersedia. Dilihat dari latar belakang pendidikan dapat dilihat bahwa paling banyak yang mengunduh data BPS merupakan lulusan Sarjana, diikuti oleh lulusan S2 sebagaimana pada gambar 8. Karakteristik pengunjung *website* bps.go.id dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9.



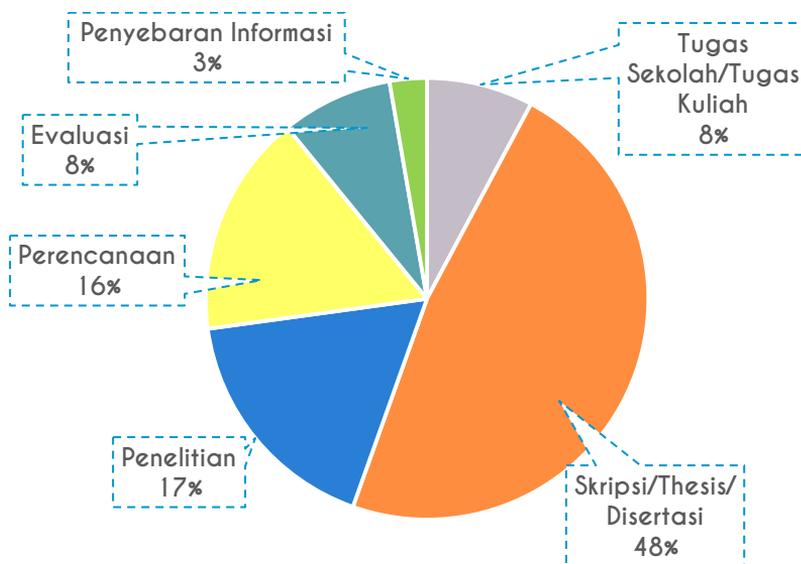
**Gambar 9. Komposisi Pengunjung Website Terdaftar Menurut Pekerjaan/Profesi**

Dilihat dari komposisinya jumlah pengunjung terdaftar didominasi oleh pelajar/mahasiswa. Ini mengindikasikan bahwa data yang disajikan pada website digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan tugas sekolah atau penelitian mahasiswa. Hal yang perlu lebih ditingkatkan adalah ketersediaan data hendaknya lebih diorientasikan kepada kebutuhan para peneliti maupun wiraswasta sehingga mereka akan lebih banyak mengakses data BPS yang dapat diartikan adanya peningkatan kualitas data untuk pengembangan keilmuan maupun keperluan bisnis.

### **Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional**

Data capaian untuk indikator “Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional” diperoleh melalui SKD. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 30 persen konsumen menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan

nasional, namun hasil SKD menunjukkan realisasinya hanya sebesar 24,45 persen. Artinya capaian kinerja IKU tersebut sebesar 81,50 persen jauh lebih tinggi dari pada capaian tahun 2017 yang hanya sebesar 9,24 persen. Komposisi penggunaan data BPS oleh konsumen menurut hasil SKD dapat dilihat pada Gambar 10. Salah satu yang harus ditingkatkan adalah *time reference* data terkini yang sangat dibutuhkan oleh para pengguna data agar indikator ini dapat tercapai. Data yang up to date sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi. BPS dituntut untuk mampu mempercepat waktu penyajian data. Hal ini sudah mulai dilakukan oleh BPS diantaranya dengan menggunakan metode CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*). Proses pencatatan survei/sensus yang menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan server sehingga dapat mempercepat proses pengolahan data. Harapannya waktu penyajian data akan lebih cepat.



Gambar 10. Profil Konsumen Menurut Pemanfaatan Data BPS Tahun 2018 (SKD 2018)

## Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Salah satu cara untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan prima adalah dengan meningkatkan kapasitas akses data bagi konsumen. Dengan peningkatan kapasitas, diharapkan konsumen memperoleh data yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan murah. Keberhasilan BPS dalam meningkatkan kapasitas akses data dapat diukur melalui IKU "Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS".

Hasil SKD menunjukkan jumlah konsumen yang puas terhadap akses data BPS mencapai 96,72 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 94,51 persen serta masih lebih tinggi dibandingkan target PK yang sebesar 86,00 persen. Dengan kata lain capaian kinerja indikator ini sebesar 112,47 persen. Upaya BPS dalam meningkatkan kepuasan terhadap akses data BPS diantaranya membuat tampilan *website* BPS menjadi lebih menarik dan mudah dalam mengunduh data serta peningkatan layanan melalui Pusat Layanan Statistik Terpadu (PST).

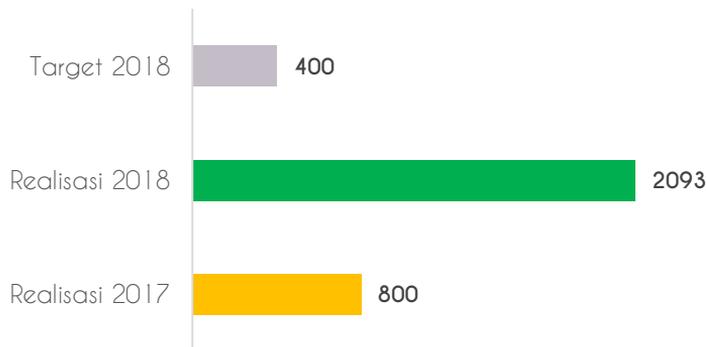


Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 3 dan Pasal 4 mengamanatkan perlunya diwujudkan dan dikembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Pasal ini selanjutnya diturunkan menjadi Perka Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional. Salah satu langkah untuk mewujudkan SSN adalah diwajibkannya instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan dipublikasikan untuk memberitahukan kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan selanjutnya mengikuti rekomendasi BPS. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam



penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda. Langkah tersebut salah satunya digambarkan dalam bentuk indikator “Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun” yang merupakan IKU dari tujuan ketiga BPS.



**Gambar 11. Target dan Realisasi Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan Khusus yang Dihimpun Tahun 2017-2018**

### Jumlah Metadata Kegiatan Statistik Sektoral dan Khusus yang Dihimpun

Selama tahun 2018 jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun sebanyak 2093 metadata. Jumlah ini jauh lebih besar dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 400 metadata serta jauh melebihi realisasi tahun 2017 sebanyak 1.920 metadata. Peningkatan jumlah terjadi karena diperluasnya cakupan wilayah pengumpulan dari tingkat provinsi menjadi tingkat kabupaten/kota serta adanya hasil Sensus Ekonomi 2016.

## Jumlah Instansi/Institusi yang Mendapatkan Rekomendasi

Indikator “Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi” mengalami penurunan target dibandingkan dengan target 2017, sebagai bentuk dari penyesuaian realisasi tahun 2017. Target di tahun 2017 sebanyak 115 instansi sedangkan realisasi hanya 5 instansi sehingga di tahun 2018 target diturunkan sangat signifikan menjadi 6 instansi dikarenakan tingkat kesadaran Kementerian/Lembaga untuk mau mengajukan permohonan rekomendasi ke BPS sebelum melakukan kegiatan survei yang masih rendah. Realisasi di tahun 2018 sejumlah 14 instansi (2 instansi pusat dan 12 instansi pemerintah daerah) atau sebesar 120 persen, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 2017 sebesar 4,35 persen.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, kemudian PP No 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik maka setiap instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan survei harus mendapatkan rekomendasi dari BPS terlebih dahulu. BPS akan melakukan telaah rencana teknis kegiatan survei yang akan dilakukan termasuk memberikan saran/masukan sesuai dengan kaidah statistik pemerintahan. BPS sudah sering melakukan sosialisasi peraturan tersebut ke Kementerian/Lembaga, namun K/L yang mengajukan rekomendasi masih sangat sedikit. Kendala yang dihadapi adalah kesadaran Kementerian/Lembaga untuk mau mengajukan permohonan rekomendasi ke BPS sebelum melakukan kegiatan survei.

## Jumlah Instansi yang Telah Menindaklanjuti Rekomendasi

Target indikator “Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi” dilakukan penyesuaian dari 28 instansi di tahun 2017 menjadi hanya 6 instansi ditargetkan di tahun 2018. Capaian di 2018 sebanyak 14 instansi yaitu instansi yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS dan mereka juga telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Capaian tahun 2018 sebesar 120 persen, sedangkan capaian di tahun 2017 sebesar 17,86 persen.

Penyesuaian target pada indikator ini agar target dapat tercapai sesuai kemampuan BPS. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 9.

**Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari Tujuan Penguatan Sistem Statistik Nasional Melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif Di Bidang Statistik Tahun 2018**

Sasaran/IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN</b>					
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	400	2.093	120,00	1.920	9,01
Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi	6	14	120,00	5	180
Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	6	14	120,00	5	180

## Tujuan 4

### Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Salah satu target utama dari reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS sebagai lembaga Negara juga harus meningkatkan akuntabilitasnya sebagaimana yang tertera pada Tujuan 4 Renstra BPS 2015-2019. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga

dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setiap Tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK BPS tersebut berdasarkan:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
3. Efektivitas sistem pengendalian intern; dan
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan BPS memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap akuntabilitas keuangan BPS pada tahun 2017. Hasil penilaian yang diserahkan pada tahun 2018 ini artinya BPS mampu mempertahankan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

#### **SS4.1.: Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik**

Agar pelayanan prima dapat diwujudkan maka diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional. Oleh sebab itu pembinaan SDM diperlukan agar pegawai semakin meningkat kualitasnya mengingat kualitas SDM merupakan kunci utama yang dapat mengubah berbagai kelemahan menjadi kekuatan serta mengubah tantangan menjadi peluang. Pembinaan SDM merupakan suatu keharusan karena masyarakat menginginkan pemerintahan yang lebih baik kualitasnya dan lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik.



Sasaran “Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik” diukur keberhasilannya melalui 3 (tiga) IKU. Rata-rata capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2018 mencapai 107,82 persen. Penjelasan tentang capaian masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik Tahun 2018”**

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	70	78,43	112,04	75,43	3
Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	70	64	91,43	58	8
Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	30	36	120,00	25	11
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>107,82</b>		

### Persentase Pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu

Indikator “Persentase Pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu” mengalami capaian kinerja yang sangat baik yaitu 112,04 persen dari target yang ditetapkan pada dokumen PK Tahun 2018 sebesar 70 persen tercapai 78,43 persen. Pelatihan teknis BPS merupakan salah satu upaya BPS untuk senantiasa meningkatkan kompetensi pegawai BPS dalam

melaksanakan kegiatan statistik. Selain itu peltihan non teknis juga dilakukan BPS seperti pelatihan SAKIP.

### **Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer**

Untuk mewujudkan SSN, penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerja sama, sehingga pelaksanaan tugas menjadi ringan dan penyediaan kebutuhan data menjadi optimal. Koordinasi akan lebih mudah jika sumber daya yang melaksanakannya mempunyai keahlian yang sama dalam hal ini statistik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) Nomor 19 tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya menugaskan BPS sebagai Instansi Pembina Jabatan tersebut. Selain itu, BPS juga merupakan Instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata komputer sebagaimana tertera dalam Keputusan MenPAN dan RB Nomor 66JKEP/M.PAN/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. Keberhasilan tugas ini diukur melalui IKU “Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga”.

Indikator ini mengalami capaian kinerja yang cukup baik yaitu 91,43 persen, meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 82,86 persen. Target yang yang ditetapkan pada dokumen PK Tahun 2018 Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer sebesar 70 persen hanya tercapai 64 persen, namun demikian realisasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 58 persen. Masih kurangnya sosialisasi maupun publisitas tentang jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer diantaranya yang mengakibatkan masih rendahnya pegawai instansi luar BPS tertarik menjadi statistisi maupun prakom. BPS kedepan diharapkan semakin menambah



sosialisasi jabatan fungsional statistisi maupun pranata komputer ke K/L/instansi lain dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan atau membuat publisitas di media masa selain memperbaiki rincian pekerjaan dan angka kredit sehingga makin menarik pegawai untuk menjadi statistisi/pranata komputer.

### **Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga**

Indikator "Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga" sebesar 120 persen, mengalami peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun 2017 yang hanya 83,33 persen. Target yang ditetapkan pada dokumen PK Tahun 2018 sebesar 30 persen dan dapat direalisasikan sebesar 36 persen. Peningkatan jumlah fungsional statistisi/pranata komputer di Kementerian/Lembaga sebagai hasil dari Permen PAN & RB tentang inpassing (pengangkatan pada jabatan fungsional) sehingga banyak pegawai yang tertarik menjadi pejabat fungsional.

### **SS4.2.: Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bukan hanya akuntabilitas keuangan saja yang perlu diperhatikan, melainkan juga akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja maka BPS diharapkan telah memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPS.

**Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Tahun 2018”**

IKU	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Realisasi 2017	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	78,00	75,01	96,17	74,96	0,05
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	76,00	77,51	101,99	77,20	0,31
Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	84,00	113,33	120,00	97,22	16,11
<b>Rata rata Capaian Kinerja</b>			<b>106,05</b>		

### Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB

BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di pusat maupun di daerah. Dari sisi pengukuran keberhasilan telah dilakukan reuiu IKU melalui Perka BPS Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perka BPS Nomor 3 Tahun 2015 tentang IKU BPS, yang kemudian diikuti dengan reuiu Renstra 2015-2019.

Pada tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan skor sebesar 75,01 atas pelaksanaan AKIP BPS, meningkat tipis dibandingkan penilaian tahun 2017 sebesar 74,96. Hasil penilaian tersebut lebih kecil dari yang ditargetkan sebesar 78 point atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut sebesar 96,17 persen. Beberapa penyebab belum tercapainya target antara lain rumusan IKU BPS dinilai masih belum baik karena beberapa IKU tingkat lembaga BPS masih dijumpai indikator output, Komitmen pimpinan BPS

belum sepenuhnya diikuti oleh jajaran di bawahnya khususnya satuan kerja dalam mengimplementasikan manajemen kinerja di unit masing-masing, penjenjangan kinerja dalam PK belum ditata dengan baik karena belum terlihat keselarasan ukuran kinerja bawahan dengan kinerja atasannya.

### Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB

Pada tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan skor sebesar 77,51 atas pelaksanaan RB BPS naik dibandingkan hasil penilaian tahun 2017 sebesar 77,20. Hasil penilaian lebih tinggi dari target 2018 sebesar 76,00 point atau dengan kata lain capaian kinerja BPS untuk indikator tersebut sebesar 101,99 persen. Dengan telah dapat dipenuhinya target kinerja, maka ke depan BPS hendaknya lebih berani memasang target lebih tinggi sehingga proses reformasi birokrasi di BPS dapat semakin lebih baik dan menyentuh semua jajaran BPS serta senantiasa berusaha memenuhi rekomendasi Kemen PAN & RB seperti berusaha membuat indicator kinerja individu berbasis kinerja unit kerja

### Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)

Pelaksanaan SAKIP di BPS bukan hanya dilaksanakan di tingkat pusat saja melainkan pada satuan kerja daerah (satker). Hasil penilaian Inspektorat BPS menunjukkan adanya peningkatan pelaksanaan SAKIP di daerah. Tercatat pada Tabel 11, realisasi tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori baik mengalami kenaikan yang tinggi dari 97,22 persen di tahun 2017 menjadi 113,33 persen pada Tahun 2018. Capaian ini disebabkan karena realisasi satker yang diperiksa dan mendapatkan nilai baik sebanyak 35 satker (33 satker BPS Provinsi, Politeknik Statistika STIS dan Pusdiklat) dari target sebanyak 33 satker. Dari 35 satker tersebut, satker Pusdiklat dan 29 BPS Provinsi



mendapatkan kategori “BB”, sedangkan satker yang mendapatkan kategori “B” adalah Politeknik Statistika STIS dan 4 BPS Provinsi.

Pada tahun 2018 telah ditindaklanjuti beberapa rekomendasi Inspektorat Utama BPS atas implementasi SAKIP 2017 sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara Biro Bina Program dan Inspektorat Utama dalam penyusunan bahan paparan dan pelaksanaan Bimbingan Teknis tentang Implementasi SAKIP di Hotel Atria Serpong Bulan Maret 2018. Dilanjutkan dengan pembinaan SAKIP di tingkat BPS Provinsi Seluruh Indonesia dengan peserta antara lain Kepala dan seluruh pejabat struktural terkait serta staf pelaksana SAKIP BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota (Maret s.d Mei 2018).
2. Mengimplementasikan e-SAKIP dalam aplikasi Si-Monev dalam pengumpulan dokumen seperti LKIP, Perjanjian kinerja, Renstra dan *Form Rencana Aksi* (FRA)

### SS4.3: Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

#### Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran ini sama dengan indikator yang digunakan pada tujuan 4. Dalam penilaian kinerja indikator, kategori opini terhadap laporan keuangan diberikan skor sebagai berikut:

- |   |          |
|---|----------|
| • Tidak menyatakan pendapat ( <i>Disclaimer</i> ) | skor 25  |
| • Tidak Wajar                                     | skor 50  |
| • Wajar Dengan Pengecualian                       | skor 75  |
| • Wajar Tanpa Pengecualian                        | skor 100 |

**Target BPS adalah Wajar Tanpa Pengecualian (Skor=100).**



Tahun 2018, BPS mendapatkan penilaian opini dari BPS “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan kata lain mendapatkan skor 100 untuk penghitungan kinerjanya sebagai konversi indikator kategorik. Artinya BPS dapat mempertahankan sekaligus memenuhi target.

#### SS4.4: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS

##### Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen dalam pelayanan. Oleh sebab itu SKD memasukkan komponen tersebut dalam daftar pertanyaan pada kuesioner SKD. Pertanyaan tersebut selanjutnya dihitung untuk mendapatkan capaian IKU yang juga merupakan salah satu Indikator kinerja keberhasilan Program PSPA BPS. Indikator “Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS” adalah indikator yang berasal dari sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)” pada tujuan 2 (Perka IKU Nomor 2 Tahun 2016). Sesuai rekomendasi Kemenpan-RB pada penilaian AKIP Tahun 2016 maka indikator ini dimuat tersendiri yaitu pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS” yang merupakan sasaran baru pada Perka IKU Nomor 2 Tahun 2017.

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS pada tahun 2018 sebesar 97,69 persen lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 93,86 persen. Angka ini jauh lebih besar bila dibandingkan target yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar 80 persen. Dengan kata lain kinerja indikator ini sebesar 120 persen.

## **Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS**

Indikator “Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS” dan Indikator “Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Diselesaikan” adalah indikator baru (reviu Perka Nomor 2 Tahun 2016) yang merupakan penajaman dari indikator-indikator sebelumnya sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kemenpan-RB pada penilaian AKIP Tahun 2016. Capaian indikator “Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS” pada tahun 2018 sebesar 100 persen (target 100 persen) sama seperti capaian pada tahun 2017. Upaya yang dilakukan untuk tetap memenuhi kepuasan pegawai diantaranya melakukan pemeliharaan maupun penambahan sarana dan prasarana pegawai. Selain itu juga senantiasa cepat merespon keluhan dari pegawai BPS.

## **Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Diselesaikan**

Capaian indikator “Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan” adalah sebesar 88,28 persen (target yang ditetapkan sebesar 100 persen pada Tahun 2018). Capaian di tahun 2018 jauh di bawah capaian tahun 2017 sebesar 98,13 persen. Rendahnya capaian pengadaan ini disebabkan karena beberapa pengadaan tidak dapat diselesaikan termasuk diantaranya penyelesaian administrasinya.

### **3.2 Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2018 dan 2019**

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya

pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

### Tujuan 1: Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

Berdasarkan Tabel 12, realisasi dari indikator tujuan 1 mencapai 96,96 persen, melampaui target tahun 2018 dan 2019 yang sebesar 85,00 persen. Target kinerja pada tahun 2019 juga telah tercapai semenjak tahun 2015 dengan realisasi sebesar realisasi pada tahun 2015 yang sebesar 85,87 persen. Untuk itu perlu penajaman target agar pengukuran keberhasilan BPS terhadap tujuan satu lebih tergambar.

**Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja BPS Tahun 2018 dengan Target Renstra Tahun 2018 dan 2019**

Tujuan/Sasaran/IKU	Target Renstra		Realisasi 2018	Capaian Thd Target (%)	
	2018	2019		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	85	85	96,96	114,07	114,07
--	----	----	-------	--------	--------

SSI.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	85	85	96,96	114,07	114,07
2. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100	100	100	100,00	100,00
3. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	90	90	88,82	98,69	98,69

Tujuan/Sasaran/IKU	Target Renstra		Realisasi 2018	Capaian Thd Target (%)	
	2018	2019		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	18	15	21	116,67	120,00
5. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu	236	238	183	92,42	92,42
6. Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu	31	32	31	100,00	96,88
7. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	35	35	23	65,71	65,71
8. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	100	100	96,99	99,51	99,51
SS1.2. Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas					
1. Jumlah Aktivitas Statistik mendeklarasikan Penjaminan Kualitas	11	13	4	36,36	30,77
Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik					
1. Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	86	86	98,11	114,08	114,08
SS2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>User Engagement</i> )					
1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	1.300.000	1.300.000	2.322.354	120,00	120,00
2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi	46	50	24,45	53,15	48,90
3. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	80	80	96,72	112,47	112,47
Tujuan 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik					
1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	500	500	2093	120,00	120,00



Tujuan/Sasaran/IKU	Target Renstra		Realisasi 2018	Capaian Thd Target (%)	
	2018	2019		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

SS3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

1. Jumlah metadada kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	500	500	2093	120,00	120,00
2. Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	115	115	14	12,17	12,17
3. Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	28	28	14	50,00	50,00

Tujuan 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
---	-----	-----	-----	-----	-----

SS4.1. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan

1. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	72	75	78,43	108,93	104,57
2. Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	72	75	64	88,89	85,33
3. Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	32	32	36	112,50	112,50

SS4.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	81	84	75,01	92,60	89,30
2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	77	79	77,20	100,66	98,11
3. Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	90	100	113,33	120,00	113,33

SS4.3. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan



Tujuan/Sasaran/IKU	Target Renstra		Realisasi 2018	Capaian Thd Target (%)	
	2018	2019		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SS4.4. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS					
1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	90	95	97,69	108,54	102,83
2. Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	100	100	100	100,00	100,00
3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	100	100	88,28	88,28	88,28

### SS1.1.: Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Dari 8 (delapan) indikator pada sasaran “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS” tercatat ada 2 (dua) indikator yang melampaui target Renstra tahun 2018 dan 2019 yaitu indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” (indikator pertama) dan indikator “Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi” (indikator keempat). Pada indikator pertama perlu dilakukan penggalan lebih dalam lagi pada proses perencanaan kegiatan selanjutnya, agar target yang ditentukan tidak terlalu rendah. Untuk indikator yang capaiannya diatas antara 95 persen tidak perlu dilakukan penurunan target melainkan penggalan lebih dalam pada proses perencanaan. Di sisi lain, terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian dibawah 95 persen yaitu indikator kelima dan ketujuh. Kedua indikator ini perlu mendapat perhatian dan perlu upaya yang lebih besar agar kinerja indikator tersebut semakin meningkat.

## SS1.2.: Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas

Sasaran “Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas” hanya memiliki 1 (satu) indikator yaitu “Jumlah aktivitas statistik mendeklarasikan penjaminan kualitas”. Capaian target indikator ini bila dibandingkan dengan target Tahun 2018 baru sebesar 36,36 persen sedangkan bila dibandingkan dengan target 2019 hanya 65,71 persen. Capaian 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2017 namun masih diperlukan penggalan yang lebih dalam lagi terutama untuk target Tahun 2019.

### Tujuan 2: Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Beberapa indikator yang diukur realisasinya melalui indikator SKD, realisasinya jauh lebih besar dari target bahkan untuk target tahun 2019. Demikian juga pada indikator yang mewakili tujuan kedua, sebagaimana tercatat pada Tabel 12 realisasinya sebesar 98,11 persen, jauh dari target tahun 2019 yang sebesar 86,00 persen. Untuk itu perlu penggalan lebih dalam lagi khususnya dalam penentuan target agar pengukuran keberhasilan tujuan ini menjadi lebih baik.

### SS2.1.: Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yang realisasinya melebihi target renstra Tahun 2018 dan Tahun 2019 yaitu indikator “Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website” (indikator pertama) dan indikator “Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS” (indikator kedua). Agar pengukuran keberhasilan BPS dalam mewujudkan sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)” menjadi lebih baik, perlu dilakukan penajaman target pada

kedua indikator tersebut. Di sisi lain, capaian indikator “Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi” (indikator kedua) sangat jauh dari target Renstra Tahun 2018 dan Tahun 2019, untuk itu perlu digali informasi lebih dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut.

### **Tujuan 3: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif di Bidang Statistik**

Tujuan 3 diwakili oleh indikator “Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun”. Seperti telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun jauh melebihi target PK Tahun 2018 sebagai dampak diperluasnya cakupan pengumpulan metadata hingga level kabupaten/kota. Realisasi tersebut juga jauh lebih besar jika dibandingkan target renstra tahun 2019. Untuk itu perlu dilakukan penajaman target, sehingga capaian kinerja yang diperoleh indikator tersebut dapat menggambarkan kinerja BPS.

#### **SS3.1.: Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Dalam Penyelenggaraan SSN**

Sasaran ini keberhasilannya diukur melalui 3 indikator, indikator pertama yaitu “Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun” merupakan indikator yang mewakili tujuan ketiga. Indikator kedua yaitu “Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik” capaiannya jauh dari target yang ditetapkan pada Renstra.

Demikian juga dengan indikator ketiga yaitu “Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi” mengalami capaian jauh dari target yang ditetapkan pada Renstra sejumlah 28 instansi namun hanya tercapai 14 instansi. Karena itu perlu dilakukan revisi target pada kedua indikator tersebut sesuai dengan keadaan bahwa Kementerian/Lembaga masih banyak yang



belum sadar/mau untuk mengajukan rekomendasi ke BPS sebelum mereka melakukan kegiatan survei.

#### **Tujuan 4: Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel**

WTP akan selalu menjadi target BPS dalam pencapaian akuntabilitas keuangan, hal tersebut tercatat pada Renstra BPS 2015-2019. Tahun 2017 BPS mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini telah sesuai dengan target renstra.

##### **SS4.1.: Meningkatnya Kualitas Pembinaan SDM dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik**

Sasaran ini memiliki 3 (tiga) indikator “Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi” (indikator pertama), “Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer” (indikator kedua) dan “Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga” (indikator ketiga).

Dari ketiga indikator yang ada pada sasaran ini, ada dua indikator yang sudah tercapai targetnya yaitu indikator pertama dan indikator ketiga dengan capaian masing-masing sebesar 108,93 persen dan 112,50 persen. Sedangkan untuk indikator kedua tidak tercapai dan masih jauh dari target, sehingga perlu sosialisasi yang lebih masif atau dilakukan revisi target sesuai kemampuan BPS.

##### **SS4.2.: Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS**

Jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2018, dari 3 (tiga) indikator pada sasaran ini hanya ada 2 (dua) indikator yang capaiannya melampaui target, yaitu Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB dengan capaian sebesar 100,26 persen dan Tingkat satker yang

mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa) capaian sebesar 120,00 persen. Sedangkan untuk indikator “Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB” capaiannya masih dibawah 100 persen sehingga perlu upaya lebih keras agar hasil Penilaian SAKIP BPS terus meningkat sesuai dengan apa yang ditargetkan. Yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang telah disarankan Kemenpan & RB.

### **SS4.3.: Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan**

Sasaran ini keberhasilannya diukur oleh satu indikator yang juga merupakan indikator dari tujuan keempat. Pencapaian indikator ini telah dijelaskan pada penjelasan indikator tujuan keempat.

### **SS4.4.: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS**

Sasaran ini keberhasilannya diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu indikator “Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS”, indikator “Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS” dan indikator “Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan”. Dari ketiga indikator pada sasaran ini, terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai target yaitu indikator pertama dan kedua, sedangkan indikator ketiga yaitu “Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan” tidak mencapai target hanya 88,28 persen karena ada beberapa pengadaan barang/jasa yang tidak terlaksana.

### 3.3 Capaian Kinerja BPS terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2018

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI No 79 Tahun 2017 dengan tema **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”** melalui pendekatan tematik, holistik, integrasi dan spasial dengan memperhatikan penajaman program prioritas nasional. Sasaran prioritas RKP 2018 terbagi atas 10 prioritas nasional dan satu prioritas khusus yaitu Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 serta 30 program prioritas. Sepuluh prioritas nasional tersebut adalah : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perumahan dan Pemukiman, (4) Pengembangan dunia usaha dan pariwisata, (5) Ketahanan energi, (6) Ketahanan pangan, (7) Penanggulangan kemiskinan, (8) Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, (9) Pengembangan wilayah, (10) Politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

BPS berperan dalam mendukung 2 (dua) program prioritas nasional melalui dukungan ketersediaan data untuk program prioritas ke-4 dan ke-6. Aktivitas yang mendukung prioritas nasional di tahun 2018, yaitu:

A. Program Prioritas Nasional Ke-4 **“Pengembangan dunia usaha dan pariwisata”** melalui aktivitas :

1. Penyusunan Disagregasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) PMTB Institusi dan Sektoral
2. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional
3. Tabel Input Output (IO) Pariwisata
4. Survei Wisatawan Nusantara
5. *Passenger Exit Survey* (PES)

B. Program Prioritas Nasional Ke-6 **“Ketahanan pangan”**, melalui aktivitas :

1. Survei Pertanian Antar Sensus
2. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan

3. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA
4. Survei Konversi Gabah ke Beras

Penjelasan dan capaian kinerja aktivitas pendukung program prioritas nasional sebagai berikut:

## **A. Program Prioritas Nasional : PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA**

### **1. Penyusunan Disagregasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) PMTB Institusi dan Sektoral**

Barang modal atau kapital merupakan salah satu faktor produksi yang memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Kapital diperoleh karena adanya kegiatan investasi, dalam hal ini biasanya lebih dikenal dengan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB). Posisi PMTB atau barang modal merupakan indikator kapasitas produksi dari suatu negara yang menggambarkan nilai barang modal pada keadaan satu saat yang terjadi karena adanya proses akumulasi penambahan dan pengurangan barang modal. (PMTB) merupakan suatu bagian penting dalam suatu perekonomian karena investasi mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengetahui nilai barang modal (PMTB) menurut jenis barang, institusi, dan lapangan usaha berdasarkan konsep SNA 2008.

Output kegiatan ini adalah Laporan Hasil Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018. Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah kesalahan pengisian nominal dan satuan oleh petugas, ketidakterersediaan data di dinas, serta perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan.

Kinerja aktivitas Penyusunan Disagregasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) PMTB Institusi dan Sektoral sebesar 107,32 persen.

## 2. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Peningkatan jumlah destinasi dan investasi dalam pembangunan pariwisata, telah mengubah pariwisata sebagai penggerak utama (*key driver*) kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur. Untuk melihat keterkaitan antarsektor serta dampak ekonomi yang diciptakan oleh kegiatan pariwisata, dibutuhkan data yang akurat, terpercaya, terkini, dan konsisten yang meliputi semua aspek yang terkait dengan pariwisata. Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) adalah suatu sistem neraca terpadu sektor pariwisata yang mampu menjawab tuntutan tersebut yang dibangun berdasarkan pengembangan dan turunan dari sistem neraca nasional yang bersifat lebih khusus atau kompleks. Baik metode, penghitungan dan analisa yang dilakukan merupakan adopsi dari sistem neraca nasional.

Maksud penyusunan Nesparnas ini dalam rangka peningkatan dan pemenuhan data pariwisata sebagai salah satu leading sector dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan untuk mengetahui kontribusi, kemampuan serta daya saing pariwisata dalam perekonomian nasional maupun internasional.

Tujuan penyusunan Nesparnas adalah untuk mengetahui nilai agregat makro ekonomi yang menggambarkan besaran dan kontribusi pariwisata dalam perekonomian. Nilai agregat makro ekonomi yang dihitung dalam Nesparnas meliputi peranan pariwisata dalam pembentukan PDB, peningkatan pendapatan masyarakat, penerimaan pajak pemerintah, dan penyerapan tenaga kerja. Selain mengetahui peranan pariwisata dalam perekonomian nasional, Nesparnas juga menyajikan data yang lebih rinci mengenai konsumsi wisatawan (*wisman*, *wisnus*, dan *wisnas*), investasi terkait pariwisata dan pengeluaran pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan pariwisata.

Output penyusunan Nesparnas tahun 2018 ini adalah publikasi Neraca Satelit Pariwisata Nasional 2017.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan Nesparnas tahun 2018 ini adalah belum lengkapnya semua data yang diperlukan data investasi pariwisata dan Tabel IO pariwisata. Hasil survei PES 2017 yang digunakan untuk mengetahui rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan juga belum ada, sehingga harus diestimasi.

Kinerja aktivitas Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional sebesar 100,0 persen

### 3. Tabel IO Pariwisata

Dalam rangka peningkatan dan pemenuhan data industri pariwisata sebagai salah satu leading sector dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan untuk mengetahui kemampuan dan daya saing Industri Pariwisata, maka perlu dilakukan penyusunan Tabel I-O Pariwisata Indonesia. Tabel I-O Pariwisata Indonesia merupakan suatu alat yang digunakan untuk bahan perencanaan ekonomi. Dalam penyusunan Tabel I-O Pariwisata, membutuhkan pemahaman secara detail terkait dengan aktifitas-aktifitas di bidang pariwisata. Pemahaman yang mendetail tersebut bisa didapatkan dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam aktifitas pariwisata. Untuk itulah dilaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang akan menambah wawasan dan informasi kegiatan usaha di bidang pariwisata.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan gambaran rinci tentang penyediaan barang dan jasa produksi dalam negeri dan impor dan penggunaan barang dan jasa untuk konsumsi antara dan konsumsi akhir (konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, ekspor) khususnya di Industri Pariwisata; sebagai ukuran perhitungan hubungan antarsektor Pariwisata dalam suatu perekonomian; dan sebagai evaluasi hubungan data dengan sektor lain.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu Publikasi Tabel I-O Pariwisata 2014. Sementara kendala yang dihadapi pada kegiatan ini

adalah keterbatasan dalam memperoleh *proxy* untuk memecah indikator pariwisata dan non pariwisata serta sedikitnya jumlah sampel *indepth study* yang dapat digunakan untuk menunjang penghitungan tabel I-O Pariwisata. Kinerja aktivitas Tabel IO Pariwisata sebesar 100,00 persen

#### 4. Survei Wisatawan Nusantara

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia diarahkan agar kegiatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain yang terkait erat. Pemerintah selain gencar menarik minat wisatawan mancanegara untuk meningkatkan devisa, juga sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Meskipun wisnus tidak mendatangkan devisa bagi negara, namun tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kemampuannya menggerakkan perekonomian negara. Wisnus mampu menghidupkan sektor angkutan, perhotelan, industri kreatif, dan lain sebagainya.

Maksud dilaksanakannya survei wisatawan nusantara adalah:

- Memperoleh data jumlah perjalanan wisnus, baik dari provinsi/kabupaten asal, maupun provinsi/kabupaten tujuan.
- Profil Wisnus yang meliputi Profil Demografi (Umur, jenis kelamin, pekerjaan, dsb), Pola perjalanan (Lama tinggal, akomodasi, moda transportasi, dsb), dan Pola perjalanan (Akomodasi, makan/minum, transportasi, dsb)

Keluaran (Output)/Indikator Output Aktivitas adalah Publikasi Statistik Wisatawan Nusantara

Kinerja aktivitas Survei Wisatawan Nusantara sebesar 100,6 persen

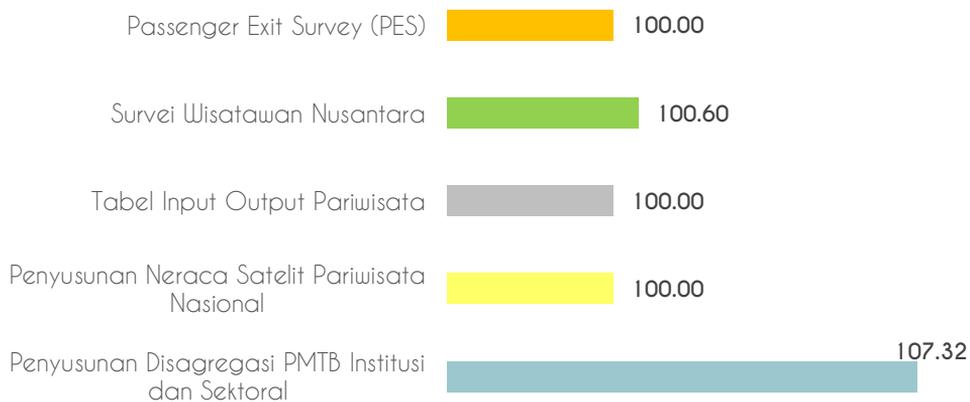
#### 5. Passenger Exit Survey (PES)

Maksud dan tujuan utama kegiatan ini yaitu untuk memperoleh data rata-rata pengeluaran per kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia. Selain itu, PES juga

digunakan untuk memperoleh informasi lain dari wisman yang berkunjung ke Indonesia, seperti profil demografi wisman (jenis kelamin, umur, kebangsaan, dan pekerjaan utama) dan pola perjalanan wisman (maksud utama kunjungan, jenis akomodasi yang digunakan, dan moda transportasi). Output kegiatan ini adalah publikasi tahunan yaitu Statistik Profil Wisatawan Mancanegara 2018.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah revisi DIPA yang baru turun di pertengahan tahun menyebabkan pelaksanaan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa terlambat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan survei mundur dari jadwal yang direncanakan. Dalam pelaksanaan lapangan juga menghadapi kendala terutama terkait pengurusan ijin di Bandara atau pelabuhan lokasi survei. Kinerja aktivitas *Passenger Exit Survey* (PES) sebesar 100 persen

Rata-rata capaian kinerja untuk aktivitas-aktivitas yang mendukung prioritas nasional **"Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata"** sebesar 101,58 persen.



**Gambar 12. Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Tahun 2018**



## B. Program Prioritas Nasional : KETAHANAN PANGAN

### 1. Survei Pertanian Antar Sensus

Pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Di samping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, ketersediaan data sektor pertanian yang lengkap, akurat, dan terkini sangat dibutuhkan sebagai acuan bagi pemerintah dan stakeholders dalam perencanaan dan perumusan kebijakan.

Penyediaan data pertanian berbasis sensus dilakukan setiap periode sepuluh tahun, sedangkan perubahan usaha pertanian sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi, perubahan musim, dan harga. Sensus Pertanian terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2013. Pada tahun 2018 dilaksanakan Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS2018) pada pertengahan periode Sensus Pertanian tahun 2013 (ST2013) dan Sensus Pertanian tahun 2023 (ST2023). SUTAS2018 merupakan Survei Pertanian Antar Sensus yang pertama kali dilakukan oleh BPS.

Tujuan diadakan SUTAS2018 untuk memperkirakan populasi rumah tangga usaha pertanian menurut subsektor per kabupaten/kota; memperkirakan populasi komoditas; serta memperkirakan produktivitas komoditas dan parameter populasi ternak.

SUTAS2018 dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia. Jumlah sampel blok sensus terpilih sebanyak 55.679 Blok Sensus. SUTAS2018 hanya mencakup rumah tangga usaha pertanian dalam blok sensus terpilih. Output dari kegiatan ini yaitu Publikasi Hasil Survei Pertanian Antar Sensus 2018.

Kinerja aktivitas Survei Pertanian Antar Sensus sebesar 100,00 persen

## 2. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan

Maksud dan tujuan survei ini yaitu untuk mendapatkan data luas tanam, panen, serta luas puso tanaman pangan; luas baku lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah; banyaknya alat/mesin pertanian (Alsintan); dan keterangan tentang perbenihan dari laporan Dinas Pertanian, serta data produktivitas (rata-rata hasil per hektar) tanaman pangan dari Survei Ubinan.

Output survei ini adalah Laporan Luas Lahan Menurut Penggunaan 2017, Produksi Padi 2017, dan Produksi Palawija 2017 yang tidak dirilis untuk khalayak umum dan diperuntukkan hanya untuk kalangan internal BPS karena masih dilakukan upaya penyempurnaan data Statistik Tanaman Pangan.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah metode pengumpulan data yang masih perlu dikembangkan agar kualitas data produksi tanaman pangan menjadi lebih baik, serta alat ubinan yang jumlahnya terbatas.

Kinerja aktivitas Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan sebesar 98,34 persen

## 3. Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Data luas panen padi yang diperoleh BPS dari laporan Statistik Pertanian (SP) Padi masih memiliki kelemahan dalam akurasi yang rendah dan waktu pengumpulan data yang cukup lama. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan sistem pelaporan yang digunakan dalam pengumpulan data statistik pertanian yang berbasis teknologi dalam

rangka menyempurnakan metodologi pengumpulan data statistik pertanian. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam suatu kegiatan yang bertajuk Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yakni Uji Coba Sistem Kerangka Sampel Area (KSA) di Kabupaten Indramayu dan Garut yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan KSA di Pulau Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Dalam kegiatan ini dilakukan pengamatan fase tumbuh padi pada titik-titik pengamatan dalam sampel segmen.

Maksud dan tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data luas panen yang konvensional menjadi lebih obyektif, ilmiah, dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Luas Panen dan Produksi Beras di Indonesia 2018.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah lokasi sampel di beberapa wilayah yang sulit diakses dan belum tersedianya asuransi untuk petugas.

Kinerja aktivitas Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) sebesar 104,93 persen

#### 4. Survei Konversi Gabah ke Beras

Data berat hasil ubinan yang dikumpulkan (hasil panen) adalah dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) sedangkan data produksi padi yang dipublikasikan oleh BPS adalah dalam kualitas Gabah Kering Giling (GKG) dan data yang diperlukan oleh Pemerintah dalam perumusan kebijakan pangan adalah dalam bentuk beras. Penghitungan produksi padi-beras dari GKP ke GKG dan dari GKG ke beras dilakukan dengan menggunakan angka konversi pengeringan dan rendemen penggilingan. Mengingat program-program pemerintah yang sangat masif dalam hal mekanisasi

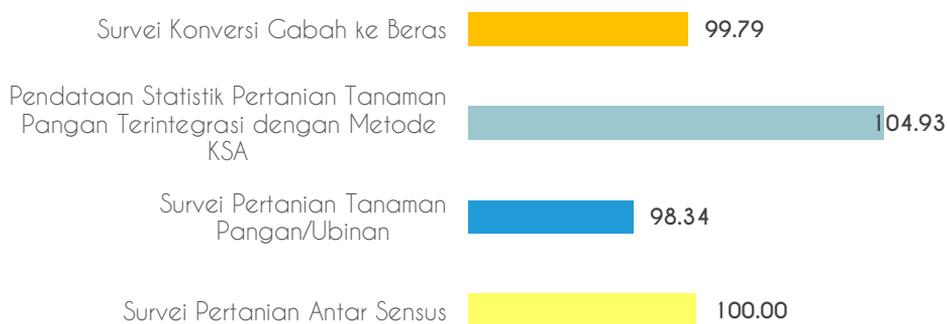
saat pasca dan panen untuk mengurangi kehilangan hasil, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan angka konversi yang sudah ada.

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk memutakhirkan angka konversi gabah ke beras yang dihasilkan dari survei pada tahun 2005-2007 yang akan digunakan dalam perhitungan produktivitas/produksi padi dan produksi beras. Output kegiatan ini adalah Publikasi Survei Konversi Gabah ke Beras 2018.

Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah di beberapa daerah mayoritas panen terjadi pada bulan Januari-Februari sehingga pada periode Maret-April agak sulit menemukan gabah yang sedang dikeringkan dan gabah yang akan digiling.

Kinerja aktivitas Survei Konversi Gabah ke Beras sebesar 99,79 persen

Rata-rata capaian kinerja untuk aktivitas-aktivitas yang mendukung prioritas nasional "**Ketahanan Pangan**" sebesar 100,77 persen.



**Gambar 13. Capaian Kinerja Program Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Tahun 2018**



### 3.4 Prestasi Tahun 2018

Berbagai prestasi yang berhasil diukur atas kinerja BPS pada tahun 2018 antara lain:

1. BPS berhasil mengakhiri polemik data produksi beras melalui Kerangka Sampel Area (KSA).

Persoalan data produksi beras kerap menjadi polemik di Indonesia karena perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS), dengan kementerian terkait. Polemik data produksi beras yang terjadi sejak 1997 salah satunya dikarenakan perhitungan luas panen khususnya padi yang menggunakan metode *eye estimate* yang dianggap kurang ilmiah. Akurasi data luas panen menggunakan metode *eye estimate* belum terukur, data luas panen disinyalir kurang objektif dan data luas panen disinyalir *overestimate*.

BPS bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPS), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan perbaikan metode pengumpulan data dengan menerapkan metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang merupakan salah satu pendekatan statistik spasial yang dikembangkan oleh FAO (*Food Agricultural Organisation*), USDA (*United State Department of Agriculture*), dan EUROSTAT Uni Eropa.

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla bersama Kepala BPS, juga beberapa menteri dan kepala lembaga menyampaikan hasil perbaikan penghitungan luas panen dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) di depan awak media di Kantor Wapres. Setelah dirilis oleh Wapres, data produksi beras digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan di sektor pangan. Presiden Jokowi menyatakan bahwa data beras BPS

sebagai acuan sekaligus mengakhiri polemik perbedaan data produksi beras. Berita terkait KSA dapat dilihat pada lampiran.

2. BPS mendapatkan Penghargaan Subroto 2018 Bidang Efisiensi Energi, Kategori Penghematan Energi Pada Instansi Pemerintah Pusat, Juara Harapan II.
3. Pusdiklat BPS mendapat Akreditasi B dalam Program dan Pelatihan dengan Akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.
4. BPS Rangkaing 2 Sistem Data Terbuka ASEAN atau Rangkaing 27 dari 180 negara dari *Open Data Watch* (ODW), organisasi nirlaba non pemerintah yang memonitor kemajuan dan memberikan informasi serta bantuan peencanaan sistem data terbuka di negara berkembang dan lembaga mitra mereka serta memberi laporan kemajuan mereka.

Dalam laporan mereka tanggal 3 Maret 2018 berupa *Open Data Inventory* (ODIN) 2017, ODW mengumumkan bahwa Indonesia mendapatkan skor keseluruhan 58, peringkat ke 27 dari 180 negara di dunia dan peringkat ke 2 ASEAN (kalah dari Singapura). *Ranking openness web* BPS meningkat dari rangkaing 84 di tahun 2016 menjadi 27 di tahun 2017. Peringkat ASEAN naik dari rangkaing 3 ke rangkaing 2.

5. Banyak satker BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan dari instansi lain.
  - a. Kementerian Keuangan melalui kantor wilayah masing-masing (Kanwil DJPB, DJKN dll).
  - b. Komisi Informasi
  - c. Pemerintah Daerah

Penghargaan satker BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

### 3.5 Upaya Efisiensi BPS 2018

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS selama tahun 2018:

1. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 4.353,92 miliar atau 91,15 persen dari pagu sebesar Rp 4.777,88 miliar. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja baik tujuan maupun sasaran yang masing masing sebesar 112,04 persen dan 104,98 persen, dapat dikatakan BPS telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi juga terlihat pada pelaksanaan seluruh program dan hampir seluruh sasaran. Masing-masing program memiliki capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran sebagaimana terlihat pada Tabel 13.

**Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Program Tahun 2018**

Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)
DMP TTL	100,77	92,82
PSPA	104,14	90,94
PPAA	107,69	95,33
PPIS	104,41	88,50
<b>TOTAL</b>		<b>91,15</b>

2. Tahun 2018, berdasarkan Peraturan Presiden RI No 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik maka tunjangan kinerja pegawai BPS mengalami kenaikan. Total kebutuhan biaya atas kenaikan tersebut sekitar Rp. 203,35 Milyar yang dibebankan pada alokasi biaya dalam DIPA BPS yang sudah ada. Untuk keperluan tersebut maka BPS melakukan berbagai efisiensi diantaranya Sekretaris Utama BPS telah mengeluarkan surat rencana efisiensi anggaran ke semua satker BPS. Beberapa hal yang dilakukan adalah integrasi

beberapa pelatihan petugas survei untuk menghindari pemanggilan petugas secara berulang dalam waktu berdekatan, efisiensi pelaksanaan konsinyering, pengadaan bahan komputer dan ATK, sisa hasil lelang dll. Dengan dilakukan efisiensi tersebut maka BPS telah menghemat keuangan negara untuk memenuhi kenaikan tunjangan kinerja pegawai BPS tanpa membebankan kepada Kementerian Keuangan.

3. Penghematan sumber daya energi, upaya ini diapresiasi oleh Kementerian ESDM, BPS meraih juara harapan II dalam kategori hemat energi dan air.

**Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2018**

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	(%) Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01-Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Terhadap Kualitas Data BPS	101,93	1.584,61	1.426,45	90,02
02-Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas	100,00	152,75	111,41	72,93
03-Meningkatnya Kualitas Hubungan Dengan Pengguna Data ( <i>User Engagement</i> )	104,66	2.550,30	2.414,09	94,66
04-Meningkatnya Koordinasi Dan Kerjasama Dalam Penyelenggaraan SSN	120,00	13,72	10,13	73,87
05-Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	107,82	101,74	92,27	90,69
06-Meningkatnya Pengawasan Dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	106,05	122,40	71,24	58,20
07-Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran Dan Pelaksanaan Kegiatan	100,00	4,49	3,92	87,22
08-Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	102,76	247,87	225,41	90,94

Seperti pada Tabel 13b terlihat bahwa seluruh sasaran capaiannya berada di atas realisasi anggarannya.

### 3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018 BPS menggunakan anggaran sebesar Rp 4.777,88 miliar rupiah dengan rincian belanja operasional (Belanja pegawai dan Belanja barang operasional) sebesar Rp 2.531,80 miliar dan belanja non operasional sebesar 2.246,08 miliar. Jika dibandingkan dengan pagu yang diterima, realisasi anggaran BPS pada tahun 2018 mencapai Rp. 4.354,92 Miliar atau 91,15 persen.

**Tabel 15. Realisasi Pagu BPS menurut jenis Belanja TA 2018 (Miliar Rupiah)**

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Operasional	2.531,80	2.397,30	94,69
Non Operasional	2.246,08	1.957,62	87,16
<b>Total</b>	<b>4.777,88</b>	<b>4.354,92</b>	<b>91,15</b>

Jika dirinci menurut sumber dana perbandingan antara realisasi dengan pagu, persentase realisasi anggaran yang berasal dari Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD) adalah yang terbesar yaitu 100 persen. Selanjutnya berturut-turut adalah Hibah Langsung Luar Negeri (HLL) sebesar 95,29 persen, Rupiah Murni (RM) sebesar 91,32 persen dan yang paling rendah realisasinya adalah Penerimaan Non Pajak (PNP) sebesar 69,18 persen.

Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran BPS berasal program DMPTTL dengan realisasi sebesar Rp 2.576,28 miliar kontribusinya mencapai 59,16 persen. Kontribusi terbesar kedua berasal dari dari Program PPIS dengan realisasi sebesar Rp 1.540,09 miliar kontribusinya terhadap total realisasi anggaran BPS sebesar 35,36 persen. Adapun untuk Program PSPA dan PPAA

masing-masing kontribusinya sebesar 5,18 persen dan 0,30 persen. Informasi lebih lengkap tentang realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 16.

**Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2018 (Milyar Rupiah)**

Program/ Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)	Kontribusi terhadap Realisasi Total
(1)	(2)	(3)	(4)	
01 DMPTTL	2.775,605	2.576,273	92,82	59,16
02 PSPA	247,874	225,377	90,92	5,18
03 PPAA	13,793	13,149	95,33	0,30
06 PPIS	1.740,605	1.540,089	88,48	35,36
Total	4.777,877	4.354,920	91,15	100,00

Beberapa hal yang mengakibatkan rendahnya serapan anggaran BPS diantaranya masih adanya pembangunan gedung kantor yang belum selesai sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018. Mundurnya penyelesaian pekerjaan dikarenakan ijin pencabutan moratorium pembangunan gedung kantor yang diterima dari Sekretariat Kabinet keluar setelah pertengahan tahun. Akibatnya jadwal lelang dan pengerjaan fisik menjadi terlambat. Beberapa pengadaan barang modal di program PPIS, DMPTTL dan PSPA mengalami gagal bayar. Dari sisi pekerjaan, penyedia jasa sudah melaksanakan pekerjaannya namun pada saat proses pembayaran melewati akhir TA 2018. Permasalahan tata kelola penyelenggaraan administrasi keuangan perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat mendukung kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun berikutnya.



## BAB IV

PENUTUP



# BAB IV

## PENUTUP

Kinerja BPS pada tahun 2018 dapat dikatakan memuaskan dengan capai kinerja tujuan sebesar 112,04 persen dan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 105,57 lebih baik dibandingkan capaian kinerja tahun 2017. Dari sisi pengguna data, hasil SKD menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi pada kualitas dan layanan data BPS (capaian 96,96 persen dan 98,11 persen). Berbagai penghargaan yang diterima, menjadi salah satu bukti tercapainya tujuan BPS.

Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target beberapa IKU. Selain itu pencapaian pada tahun depan juga harus ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja antara lain:

### Perumusan IKU untuk Tingkat Lembaga BPS

Rumusan IKU tingkat lembaga dinilai masih belum mencerminkan *outcome* yang dihasilkan oleh BPS karena masih dijumpai indikator kinerja output yang cukup dimunculkan di tingkat eselon II. Rumusan IKU ini diikuti dengan perumusan kembali penjenjangan kinerja (*cascading*) sehingga dapat mencerminkan keselarasan kinerja tingkat lembaga sampai dengan unit kerja terendah.

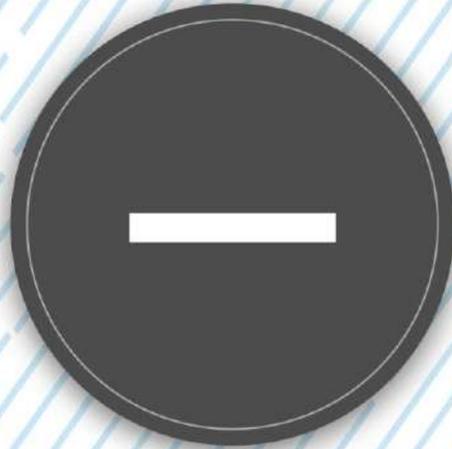


## Penajaman dan Revisi Target Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa indikator terutama yang pengukurannya diperoleh dari hasil SKD, realisasinya jauh melampaui target akhir Renstra 2015-2019. Agar kinerja BPS terus meningkat dan belum adanya rencana untuk menggantikan SKD dalam mengukur indikator dimaksud, maka perlu dilakukan penajaman (peningkatan) target kinerja. Penajaman diharapkan menjadi pendorong bagi BPS untuk berkinerja jauh lebih baik.

Selain penajaman target perlu juga dilakukan revisi target karena ada beberapa indikator yang targetnya terlalu tinggi sehingga BPS belum siap untuk mencapai target yang ditetapkan pada Renstra tersebut, seperti indikator jumlah instansi/institusi yang mendapatkan serta menindaklanjuti rekomendasi kegiatan statistik. Pencapaian kinerja indikator ini sangat tergantung pada tingkat kesadaran instansi/institusi untuk mengajukan rekomendasi kegiatan survei ke BPS. BPS telah melakukan sosialisasi ke berbagai instansi tetapi masih belum memberikan hasil yang signifikan.





LAMPIRAN



# LAMPIRAN 1

## Renstra BPS 2015 - 2019

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik						
	<b>SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS</b>					
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	85%	85%	85%
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	50%	80%	90%	90%	90%
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100%	100%	100%	100%	100%
	1.4. Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	25	15	18	18	15
	1.5. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu	230	232	234	236	238
	1.6. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	27	28	31	31	32
	1.7. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	37	5	53	35	1
	1.8. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	94%	98%	99%	100%	100%
	<b>SS.2. Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas</b>					
	2.1. Jumlah Aktivitas Statistik mendefinisikan Penjaminan Kualitas	5	7	2	11	13
	<b>SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)</b>					
	3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	3.2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional		42 %	44%	46 %	50 %

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3.3. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	80%	80%	80%	80%	80%
	<b>SS.4. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN</b>					
	4.1. Jumlah metadada kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	150	500	500-> 800	500	500
	4.2. Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik			115	115	115
	4.3. Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi			28	28	28
	<b>SS.5. Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik</b>					
	5.1. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu			70	72	75
	5.2. Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer			70	72	75
	5.3. Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga			30	32	35
	<b>SS.6. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b>					
	6.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	75	75	78	81	84
	6.2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	65	70	75	77	79
	6.3. Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)			80	90	100
	<b>SS.7. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan</b>					
	7.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	<b>SS.8. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS</b>					
	8.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas			80	90	95



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS					
	8.1. Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS			100	100	100
	8.1. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan			100	100	100





## LAMPIRAN 2

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Suhariyanto  
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Maret 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suhariyanto  
NIP. 19610615 198312 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BADAN PUSAT STATISTIK

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Data Statistik melalui Kerangka Penjaminan Kualitas	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85,00
Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Terhadap Kualitas Data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	85,00
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100,00
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	90,00
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	Aktivitas	21
	Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi	198
	Jumlah <i>release</i> data statistik yang tepat waktu	Aktivitas	28
	Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi/ Laporan	23
	Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei	Persen	97
	Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitas	Jumlah aktivitas statistik yang mendeklarasikan penjaminan kualitas	Aktivitas
Tujuan 2. Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik	Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	86
Meningkatnya Kualitas Hubungan dengan Pengguna Data ( <i>User Engagement</i> )	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Pengunjung	1.400.000
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	30
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	86

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif di Bidang Statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	400
Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dalam Penyelenggaraan SSN	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	400
	Jumlah instansi/institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Instansi	6
	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	Instansi	6
Tujuan 4. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
Meningkatnya Kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu	Persen	70
	Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	Persen	70
	Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	Persen	30
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Point	78
	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Point	76
	Tingkat satker dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP kategori baik (dari 36 satker yang diperiksa)	Persen	84
Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	80

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	100
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 2.614.678.844.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 250.756.780.000,-
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp. 13.797.909.000,-
4. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 1.881.006.430.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.760.239.963.000,-</b>

Jakarta, 23 Maret 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto  
NIP. 19610615 198312 1 001

## LAMPIRAN 3

### Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thd Target Setahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T1	Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	85,00	96,96	114,07
SS1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	85,00	96,96	114,07
		Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	Tw I	20	20	20
				Tw II	50	50	50
				Tw III	70	70	70
				Tw IV	100	100	100
		Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	90,00	88,82	98,69

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thd Target Setahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	Aktivitas	Tw I	0	0	0
				Tw II	3	3	14,28
				Tw III	5	5	23,81
				Tw IV	21	21	100,00
		Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu	Publikasi	Tw I	16	16	8,08
				Tw II	75	70	35,35
				Tw III	102	102	51,51
				Tw IV	198	183	92,42
		Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu	Aktivitas	Tw I	7	7	25,00
				Tw II	14	13	46,43
				Tw III	21	21	75,00
				Tw IV	28	31	110,71
		Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	21	0	0
				Tw IV	23	23	100
		Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei	Persen	Tw I	8	6,60	6,78
				Tw II	68	64,83	66,51
				Tw III	85	77,63	79,65
				Tw IV	97	96,99	99,51
SS2	Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar	Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas	Aktivitas	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thd Target Setahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	penjaminan kualitas			Tw IV	4	4	100
T2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	86,00	98,11	114,08
SS3	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	Pengunjung	Tw I	350.000	458.332	32,74
				Tw II	700.000	1.063.153	75,94
				Tw III	1.050.000	1.601.932	114,42
				Tw IV	1.400.000	2.322.354	120,00
		Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	30	24,45	81,5
		Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	86	98,11	114,08
T3	Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	415	103,75
				Tw III	200	771	120,00
				Tw IV	400	2093	120,00

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thd Target Setahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	bidang statistik						
SS4	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	415	103,75
				Tw III	200	771	120,00
				Tw IV	400	2.093	120,00
		Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Instansi	Tw I	0	0	0
				Tw II	1	1	16,66
				Tw III	3	2	33,33
				Tw IV	6	14	120,00
		Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	Instansi	Tw I	0	0	0
				Tw II	1	1	16,66
				Tw III	3	2	33,33
				Tw IV	6	14	120,00
T4	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	100	100	100,00
SS5			Persen	Tw I	0	0	0



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thd Target Setahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu		Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	70	78,43	112,04
		Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer	Persen	Tw I	55	55	78,57
				Tw II	60	59	84,28
				Tw III	65	64	91,43
				Tw IV	70	64	91,43
		Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga	Persen	Tw I	25	25	83,33
				Tw II	27	28	93,33
				Tw III	29	31	103,33
				Tw IV	30	36	120,00
		SS6	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	Point	Tw I	0
Tw II	0					0	0
Tw III	0					0	0
Tw IV	78,00					75,51	96,17
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	Point			Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	76,00	77,51	101,99
Tingkat satker yang	Persen			Tw I	0	0	0

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Thd Target Setahun (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)		Tw II	40	0	0	
				Tw III	84	113,33	120,00	
				Tw IV	84	113,33	120,00	
SS7	Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	Skor	Tw I	0	0	0	
				Tw II	0	0	0	
				Tw III	0	0	0	
				Tw IV	100	100	100,00	
SS8	Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	Tw I	0	0	0	
				Tw II	0	0	0	
				Tw III	0	0	0	
				Tw IV	80,00	97,69	120,00	
		Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS	Persen	Tw I	0	0	0	0
				Tw II	0	0	0	
				Tw III	0	0	0	
				Tw IV	100,00	100,00	100,00	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	Tw I	25	21,37	21,37	
				Tw II	50	39,95	39,95	
				Tw III	75	62,75	62,75	
				Tw IV	100,00	88,28	88,28	

## LAMPIRAN 4

### Perubahan Tingkat Blok Sensus Menurut Provinsi tahun 2018

Kode	Provinsi	Berubah jenis blok sensus	Ganti kode	Berubah muatan	Edit sls	Pecah blok sensus	Tambah baru	Tidak ditemukan di lapangan	Tercatat ganda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	ACEH	0	17	43	0	0	0	0	0
12	SUMATERA UTARA	10	151	757	0	4	0	0	0
13	SUMATERA BARAT	0	28	1468	0	0	0	0	0
14	RIAU	0	45	382	0	15	0	0	0
15	JAMBI	0	0	467	0	0	0	0	0
16	SUMATERA SELATAN	0	0	338	0	0	0	0	0
17	BENGKULU	0	22	114	0	6	0	0	0
18	LAMPUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	3	837	0	0	0	0	0
21	KEPULAUAN RIAU	0	0	385	0	0	0	0	0
31	DKI JAKARTA	0	0	50	0	0	0	0	0
32	JAWA BARAT	0	0	70	0	0	0	58	0
33	JAWA TENGAH	0	0	3002	0	0	0	0	0
34	DI YOGYAKARTA	0	0	386	0	0	0	0	0
35	JAWA TIMUR	0	0	2517	0	0	0	0	0
36	BANTEN	0	0	932	0	0	0	0	0
51	BALI	0	0	972	0	0	0	0	0
52	NUSA TENGGARA BARAT	0	9	60	0	0	0	0	0
53	NUSA TENGGARA TIMUR	0	67	12	0	0	0	1	0
61	KALIMANTAN BARAT	0	2	101	0	0	0	0	0
62	KALIMANTAN TENGAH	0	1	899	0	0	0	0	0
63	KALIMANTAN SELATAN	0	0	1323	0	0	0	0	0

Kode	Provinsi	Berubah jenis blok sensus	Ganti kode	Berubah muatan	Edit sls	Pecah blok sensus	Tambah baru	Tidak ditemukan di lapangan	Tercatat ganda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
64	KALIMANTAN TIMUR	0	0	168	0	0	0	0	0
65	KALIMANTAN UTARA	0	0	64	0	0	0	0	0
71	SULAWESI UTARA	0	2	757	0	0	0	0	0
72	SULAWESI TENGAH	0	0	150	0	0	0	0	0
73	SULAWESI SELATAN	0	11	665	0	0	0	0	0
74	SULAWESI TENGGARA	0	0	968	0	0	0	0	0
75	GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0
76	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
81	MALUKU	0	0	253	0	0	0	0	0
82	MALUKU UTARA	0	2	5	0	0	0	0	0
91	PAPUA BARAT	0	46	43	0	9	0	0	0
94	PAPUA	0	9	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>415</b>	<b>18188</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>



## LAMPIRAN 5

### Perubahan Wilayah Tingkat Desa Menurut Provinsi Tahun 2018

Kode	Provinsi	Pecah	Gabung	ganti kode	Ganti Nama	Ganti Kode dan Nama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	ACEH	8	0	0	1	0
12	SUMATERA UTARA	38	0	1	3	0
13	SUMATERA BARAT	162	2	0	0	0
14	RIAU	4	6	0	0	0
15	JAMBI	0	0	0	1	0
16	SUMATERA SELATAN	0	0	11	29	1
17	BENGKULU	0	0	0	0	0
18	LAMPUNG	21	0	0	0	0
19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	0	0	17	0
21	KEPULAUAN RIAU	0	0	0	0	0
31	DKI JAKARTA	0	0	0	0	0
32	JAWA BARAT	0	0	0	4	0
33	JAWA TENGAH	0	0	0	6	0
34	DI YOGYAKARTA	0	0	0	0	0
35	JAWA TIMUR	0	0	0	0	0
36	BANTEN	0	0	0	0	0
51	BALI	0	0	0	0	0
52	NUSA TENGGARA BARAT	6	2	10	0	0
53	NUSA TENGGARA TIMUR	58	0	23	0	0
61	KALIMANTAN BARAT	9	0	0	14	0
62	KALIMANTAN TENGAH	6	3	0	0	0
63	KALIMANTAN SELATAN	0	0	10	4	1
64	KALIMANTAN TIMUR	12	0	0	0	0
65	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	0

Kode	Provinsi	Pecah	Gabung	ganti kode	Ganti Nama	Ganti Kode dan Nama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71	SULAWESI UTARA	0	0	0	0	0
72	SULAWESI TENGAH	2	2	0	0	0
73	SULAWESI SELATAN	0	10	0	1	0
74	SULAWESI TENGGARA	44	2	2	0	0
75	GORONTALO	9	11	0	0	0
76	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	0
81	MALUKU	0	2	0	0	0
82	MALUKU UTARA	6	0	0	0	0
91	PAPUA BARAT	38	5	5	4	0
94	PAPUA	311	23	61	29	1
<b>Total</b>		<b>734</b>	<b>68</b>	<b>123</b>	<b>113</b>	<b>3</b>



## LAMPIRAN 6

### Perubahan Wilayah Tingkat Kecamatan Menurut Provinsi Tahun 2018

Kode	Provinsi	Pecah	Gabung	ganti kode	Ganti Nama	Ganti Kode dan Nama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	ACEH	0	0	0	0	0
12	SUMATERA UTARA	0	0	0	0	0
13	SUMATERA BARAT	0	0	0	0	0
14	RIAU	0	0	0	0	0
15	JAMBI	0	0	0	1	0
16	SUMATERA SELATAN	2	0	0	0	0
17	BENGKULU	0	0	0	0	0
18	LAMPUNG	0	0	0	2	0
19	KEPULAUAN BELITUNG	0	0	0	0	0
	BANGKA					
21	KEPULAUAN RIAU	0	0	0	0	0
31	DKI JAKARTA	0	0	0	0	0
32	JAWA BARAT	0	0	0	0	0
33	JAWA TENGAH	0	0	0	0	0
34	DI YOGYAKARTA	0	0	0	0	0
35	JAWA TIMUR	0	0	0	0	0
36	BANTEN	0	0	0	0	0
51	BALI	0	0	0	0	0
52	NUSA TENGGARA BARAT	2	0	0	0	0
53	NUSA TENGGARA TIMUR	4	0	0	0	0
61	KALIMANTAN BARAT	0	0	0	1	0
62	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	0	0
63	KALIMANTAN SELATAN	2	0	0	0	0
64	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	0	0
65	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	0

Kode	Provinsi	Pecah	Gabung	ganti kode	Ganti Nama	Ganti Kode dan Nama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71	SULAWESI UTARA	0	0	0	0	0
72	SULAWESI TENGAH	0	0	0	0	0
73	SULAWESI SELATAN	0	0	0	1	0
74	SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0
75	GORONTALO	0	0	0	0	0
76	SULAWESI BARAT	0	0	0	0	0
81	MALUKU	0	0	0	0	0
82	MALUKU UTARA	0	0	0	0	0
91	PAPUA BARAT	0	0	0	0	0
94	PAPUA	15	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>



# LAMPIRAN 7

## ARC Publikasi BPS

### Tahun 2018

No.	Judul	Periode Terbit	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>JANUARI</b>					
1.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Januari 2018	Bulanan	05/01/2018	05/01/2018	tepat waktu
2.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, November 2017	Bulanan	29/01/2018	29/01/2018	tepat waktu
3.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, November 2017	Bulanan	29/01/2018	29/01/2018	tepat waktu
4.	Indikator Ekonomi November 2017	Bulanan	31/01/2018	31/01/2018	tepat waktu
<b>FEBRUARI</b>					
1.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Februari 2018	Bulanan	06/02/2018	06/02/2018	tepat waktu
2.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor November 2017	Bulanan	06/02/2018	06/02/2018	tepat waktu
3.	Nilai Tukar Valuta Asing di Indonesia 2017	Tahunan	28/02/2018	28/02/2018	tepat waktu
<b>MARET</b>					
1.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Desember 2017	Bulanan	01/03/2018	01/03/2018	tepat waktu
2.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Desember 2017	Bulanan	01/03/2018	01/03/2018	tepat waktu
3.	Indikator Ekonomi Desember 2017	Bulanan	01/03/2018	01/03/2018	tepat waktu
4.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Maret 2018	Bulanan	05/03/2018	05/03/2018	tepat waktu
5.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Desember 2017	Bulanan	07/03/2018	07/03/2018	tepat waktu
6.	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia (2010=100) Tahun 2017	Tahunan	22/03/2018	22/03/2018	tepat waktu
7.	Indikator Ekonomi Januari 2018	Bulanan	29/03/2018	29/03/2018	tepat waktu



No.	Judul	Periode Terbit	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Januari 2018	Bulanan	29/03/2018	29/03/2018	tepat waktu
9.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Januari 2018	Bulanan	29/03/2018	29/03/2018	tepat waktu
<b>APRIL</b>					
1.	Harga Konsumen Nasional Beberapa Barang dan Jasa 2017	Tahunan	05/04/2018	05/04/2018	tepat waktu
2.	Harga Konsumen Beberapa Barang Kelompok Makanan di 82 Kota di Indonesia 2017	Tahunan	05/04/2018	05/04/2018	tepat waktu
3.	Perkembangan Mingguan Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok di Ibukota Provinsi Seluruh Indonesia (Juli- Desember 2017)	Tahunan	05/04/2018	05/04/2018	tepat waktu
4.	Indeks Harga Konsumen di 82 Kota di Indonesia (2012=100) 2017	Tahunan	05/04/2018	05/04/2018	tepat waktu
5.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi April 2018	Bulanan	05/04/2018	05/04/2018	tepat waktu
6.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Januari 2018	Bulanan	05/04/2018	05/04/2018	tepat waktu
7.	Perkembangan Mingguan Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok di Ibukota Provinsi Seluruh Indonesia (Januari-Juni 2017)	Tahunan	05/04/2018	05/04/2018	tepat waktu
8.	Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Sandang di 82 Kota di Indonesia 2017	Tahunan	05/04/2018	05/04/2018	tepat waktu
9.	Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Kesehatan, Pendidikan, dan Transpor 82 Kota di Indonesia 2017	Tahunan	05/04/2018	05/04/2018	tepat waktu
10.	Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Perumahan di 82 Kota di Indonesia 2017	Tahunan	05/04/2018	05/04/2018	tepat waktu
11.	Statistik Nilai Tukar Petani 2017	Tahunan	06/04/2018	06/04/2018	tepat waktu
12.	Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tahun 2017	Tahunan	06/04/2018	06/04/2018	tepat waktu
13.	Statistik Upah Buruh Tani di Perdesaan 2017	Tahunan	06/04/2018	06/04/2018	tepat waktu
14.	Statistik Penduduk Lanjut Usia 2017	Tahunan	13/04/2018	13/04/2018	tepat waktu
15.	Statistik Pemuda Indonesia 2017	Tahunan	13/04/2018	13/04/2018	tepat waktu
16.	Statistik Harga Produsen Gabah di Indonesia 2017	Tahunan	17/04/2018	17/04/2018	tepat waktu
17.	Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017 Buku 1 (Sumatera, Jawa)	Tahunan	19/04/2018	19/04/2018	tepat waktu



No.	Judul	Periode Terbit	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017 Buku 2 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)	Tahunan	19/04/2018	19/04/2018	tepat waktu
19.	Indeks Harga Produsen Indonesia 2017	Tahunan	20/04/2018	20/04/2018	tepat waktu
20.	Indikator Ekonomi Februari 2018	Bulanan	27/04/2018	27/04/2018	tepat waktu
21.	Statistik Pematangan Ternak 2017	Tahunan	27/04/2018	27/04/2018	tepat waktu
22.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Februari 2018	Bulanan	30/04/2018	30/04/2018	tepat waktu
23.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Februari 2018	Bulanan	30/04/2018	30/04/2018	tepat waktu
<b>MEI</b>					
1.	Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Makanan 2017	Tahunan	07/05/2018	07/05/2018	tepat waktu
2.	Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Peternakan dan Perikanan 2017	Tahunan	07/05/2018	07/05/2018	tepat waktu
3.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Februari 2018	Bulanan	07/05/2018	07/05/2018	tepat waktu
4.	Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Non Makanan 2017	Tahunan	07/05/2018	07/05/2018	tepat waktu
5.	Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Rakyat 2017	Tahunan	07/05/2018	07/05/2018	tepat waktu
6.	Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2017 Jilid I	Tahunan	08/05/2018	11/05/2018	terlambat 3 hari
7.	Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2017 Jilid II	Tahunan	08/05/2018	11/05/2018	terlambat 3 hari
8.	Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2017 Jilid III	Tahunan	08/05/2018	11/05/2018	terlambat 3 hari
9.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Mei 2018	Bulanan	08/05/2018	08/05/2018	tepat waktu
10.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Maret 2018	Bulanan	30/05/2018	30/05/2018	tepat waktu
11.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Maret 2018	Bulanan	30/05/2018	30/05/2018	tepat waktu
12.	Indikator Ekonomi Maret 2018	Bulanan	31/05/2018	31/05/2018	tepat waktu
13.	Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran, 2013-2017	Tahunan	31/05/2018	31/05/2018	tepat waktu



No.	Judul	Periode Terbit	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>JUNI</b>					
1.	Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2017, Jilid I	Tahunan	04/06/2018	04/06/2018	tepat waktu
2.	Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor, 2017, Jilid II	Tahunan	04/06/2018	04/06/2018	tepat waktu
3.	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2018	Semesteran	04/06/2018	04/06/2018	tepat waktu
4.	Ekspor Indonesia Menurut Kode SITC, 2016-2017	Tahunan	04/06/2018	04/06/2018	tepat waktu
5.	Statistik Pendapatan Februari 2018	Semesteran	04/06/2018	04/06/2018	tepat waktu
6.	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2018	Semesteran	04/06/2018	04/06/2018	tepat waktu
7.	Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2018	Semesteran	04/06/2018	04/06/2018	tepat waktu
8.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juni 2018	Bulanan	05/06/2018	05/06/2018	tepat waktu
9.	Direktori Importir Indonesia 2017 Jilid I	Tahunan	06/06/2018	08/06/2018	terlambat 2 hari
10.	Direktori Importir Indonesia 2017 Jilid II	Tahunan	06/06/2018	08/06/2018	terlambat 2 hari
11.	Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2017	Tahunan	07/06/2018	14/09/2018	terlambat 99 hari
12.	Pendapatan Nasional Indonesia 2013-2017	Tahunan	07/06/2018	07/06/2018	tepat waktu
13.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Maret 2018	Bulanan	07/06/2018	07/06/2018	tepat waktu
14.	Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2017	Tahunan	07/06/2018	14/09/2018	terlambat 99 hari
15.	Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah 2017	Tahunan	08/06/2018	08/06/2018	tepat waktu
16.	Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 2017	Tahunan	08/06/2018	08/06/2018	tepat waktu
17.	Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil 2017	Tahunan	08/06/2018	08/06/2018	tepat waktu
18.	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, September 2017	Tahunan	11/06/2018	11/06/2018	tepat waktu
19.	Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2017	Tahunan	11/06/2018	11/06/2018	tepat waktu



No.	Judul	Periode Terbit	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, September 2017	Tahunan	11/06/2018	11/06/2018	tepat waktu
21.	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, September 2017	Tahunan	11/06/2018	11/06/2018	tepat waktu
22.	Profil Industri Mikro dan Kecil 2017	Tahunan	12/06/2018	12/06/2018	tepat waktu
23.	Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2017	Tahunan	28/06/2018	28/06/2018	tepat waktu
24.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, April 2018	Bulanan	29/06/2018	29/06/2018	tepat waktu
25.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor menurut Kelompok Komoditi dan Negara, April 2018	Bulanan	29/06/2018	29/06/2018	tepat waktu
26.	Indikator Ekonomi April 2018	Bulanan	29/06/2018	29/06/2018	tepat waktu
<b>JULI</b>					
1.	Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor Menurut Kode ISIC 2016–2017	Tahunan	02/07/2018	02/07/2018	tepat waktu
2.	Analisa Komoditi Ekspor, 2010-2017, Sektor Pertanian, Industri dan Pertambangan	Tahunan	02/07/2018	02/07/2018	tepat waktu
3.	Statistik Indonesia 2018	Tahunan	03/07/2018	03/07/2018	tepat waktu
4.	Statistik Harga Produsen Beras di Penggilingan 2017	Tahunan	05/07/2018	05/07/2018	tepat waktu
5.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juli 2018	Bulanan	05/07/2018	05/07/2018	terlambat 1 hari
6.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor April 2018	Bulanan	06/07/2018	06/07/2018	tepat waktu
7.	Statistik Koperasi Simpan Pinjam 2017	Tahunan	20/07/2018	20/07/2018	tepat waktu
8.	Evaluasi Statistik Harga Produsen Gabah 2017	Tahunan	20/07/2018	20/07/2018	tepat waktu
9.	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2013-2017	Tahunan	27/07/2018	27/07/2018	tepat waktu
10.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Mei 2018	Bulanan	30/07/2018	30/07/2018	tepat waktu
11.	Indikator Ekonomi Mei 2018	Bulanan	30/07/2018	31/07/2018	terlambat 1 hari
12.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Mei 2018	Bulanan	30/07/2018	30/07/2018	tepat waktu
<b>AGUSTUS</b>					
1.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Mei 2018	Bulanan	06/08/2018	06/08/2018	tepat waktu
2.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2018	Bulanan	06/08/2018	06/08/2018	tepat waktu
3.	Indeks Unit Value Impor 2017	Tahunan	07/08/2018	07/08/2018	tepat waktu



No.	Judul	Periode Terbit	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Indeks Pembangunan Manusia 2017	Tahunan	27/08/2018	27/08/2018	tepat waktu
5.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Juni 2018	Bulanan	30/08/2018	30/08/2018	tepat waktu
6.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Juni 2018	Bulanan	30/08/2018	30/08/2018	tepat waktu
7.	Indikator Ekonomi Juni 2018	Bulanan	31/08/2018	31/08/2018	tepat waktu
<b>SEPTEMBER</b>					
1.	Direktori Perusahaan Konstruksi 2018, Buku I: Pulau Jawa	Tahunan	03/09/2018	03/09/2018	tepat waktu
2.	Direktori Perusahaan Konstruksi 2018, Buku II: Luar Pulau Jawa	Tahunan	03/09/2018	03/09/2018	tepat waktu
3.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi September 2018	Bulanan	05/09/2018	05/09/2018	tepat waktu
4.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Juni 2018	Bulanan	06/09/2018	06/09/2018	tepat waktu
5.	Laporan Perekonomian Indonesia 2018	Tahunan	17/09/2018	17/09/2018	tepat waktu
6.	Direktori Eksporir Indonesia 2017 Jilid I	Tahunan	21/09/2018	21/09/2018	tepat waktu
7.	Direktori Eksporir Indonesia 2017 Jilid II	Tahunan	21/09/2018	21/09/2018	tepat waktu
8.	Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang 2017	Tahunan	21/09/2018	21/09/2018	tepat waktu
9.	Indikator Ekonomi Juli 2018	Bulanan	28/09/2018	28/09/2018	tepat waktu
<b>OKTOBER</b>					
1.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Juli 2018	Bulanan	01/10/2018	01/10/2018	tepat waktu
2.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Juli 2018	Bulanan	01/10/2018	01/10/2018	tepat waktu
3.	Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan 2013-2017	Tahunan	03/10/2018	03/10/2018	tepat waktu
4.	PDB Indonesia Triwulanan 2014-2018	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
5.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2013-2017	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
6.	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017, Buku 1 Pulau Sumatera	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
7.	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017, Buku 2 Pulau Jawa-Bali	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
8.	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017, Buku 3 Pulau Kalimantan	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
9.	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB 2013-2017, Buku 4 Pulau Sulawesi	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
10.	Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2013-2017, Buku 5 Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
11.	Statistik Tanaman Hias Indonesia 2017	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu



No.	Judul	Periode Terbit	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Statistik Tanaman Biofarmaka Indonesia 2017	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
14.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Oktober 2018	Bulanan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
15.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Juli 2018	Bulanan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
16.	Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Indonesia 2017	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
17.	Statistik Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Indonesia 2017	Tahunan	05/10/2018	05/10/2018	tepat waktu
18.	Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2012-2017	Tahunan	16/10/2018	16/10/2018	tepat waktu
19.	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Pengeluaran, 2013-2017	Tahunan	19/10/2018	19/10/2018	tepat waktu
20.	Indeks "Unit Value" Ekspor, 2012-2017	Tahunan	22/10/2018	22/10/2018	tepat waktu
21.	Statistik Pendaratan Ikan Tradisional 2017	Tahunan	22/10/2018	22/10/2018	tepat waktu
22.	Statistik Pelabuhan Perikanan 2017	Tahunan	22/10/2018	22/10/2018	tepat waktu
23.	Statistik Perusahaan Perikanan 2017	Tahunan	22/10/2018	22/10/2018	tepat waktu
24.	Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018	Tahunan	22/10/2018	22/10/2018	tepat waktu
25.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Agustus 2018	Bulanan	29/10/2018	29/10/2018	tepat waktu
26.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Agustus 2018	Bulanan	29/10/2018	29/10/2018	tepat waktu
27.	Neraca Rumah tangga Indonesia, 2015-2017	Tahunan	31/10/2018	31/10/2018	tepat waktu
28.	Neraca Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah tangga, 2015-2017	Tahunan	31/10/2018	31/10/2018	tepat waktu
<b>NOVEMBER</b>					
1.	Direktori Industri Manufaktur 2018	Tahunan	01/11/2018	belum rilis	
2.	Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2018	Semesteran	01/11/2018	01/11/2018	tepat waktu
3.	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Maret 2018	Semesteran	01/11/2018	01/11/2018	tepat waktu
4.	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2018	Semesteran	01/11/2018	01/11/2018	tepat waktu
5.	Indikator Ekonomi Agustus 2018	Bulanan	01/11/2018	01/11/2018	tepat waktu
6.	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2018	Semesteran	01/11/2018	01/11/2018	tepat waktu
7.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi November 2018	Bulanan	06/11/2018	06/11/2018	tepat waktu
8.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Agustus 2018	Bulanan	06/11/2018	06/11/2018	tepat waktu
9.	Kajian Lanjutan Indeks Ketimpangan Gender 2017	Lainnya	07/11/2018	07/11/2018	tepat waktu
10.	Perkembangan Indeks Produksi Triwulanan Industri Mikro dan Kecil 2016-2018	Tahunan	08/11/2018	08/11/2018	tepat waktu
11.	Direktori Perusahaan Perkebunan Karet Indonesia 2017	Tahunan	13/11/2018	13/11/2018	tepat waktu
12.	Statistik Karet Indonesia 2017	Tahunan	13/11/2018	13/11/2018	tepat waktu
14.	Statistik Teh Indonesia 2017	Tahunan	13/11/2018	13/11/2018	tepat waktu
15.	Statistik Tebu Indonesia 2017	Tahunan	13/11/2018	13/11/2018	tepat waktu



No.	Judul	Periode Terbit	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017	Tahunan	13/11/2018	13/11/2018	tepat waktu
17.	Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2017	Tahunan	13/11/2018	13/11/2018	tepat waktu
18.	Profil Kesehatan Ibu dan Anak 2018	Tahunan	15/11/2018	15/11/2018	tepat waktu
19.	Statistik Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 2018	Tahunan	16/11/2018	16/11/2018	tepat waktu
20.	Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2018	Tahunan	23/11/2018	23/11/2018	tepat waktu
21.	Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018	Tahunan	26/11/2018	26/11/2018	tepat waktu
22.	Statistik Transportasi Udara 2017	Tahunan	27/11/2018	27/11/2018	tepat waktu
23.	Statistik Transportasi Laut 2017	Tahunan	27/11/2018	27/11/2018	tepat waktu
24.	Statistik Transportasi Darat 2017	Tahunan	27/11/2018	27/11/2018	tepat waktu
25.	Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018	Tahunan	28/11/2018	28/11/2018	tepat waktu
26.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, September 2018	Bulanan	29/11/2018	29/11/2018	tepat waktu
27.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, September 2018	Bulanan	29/11/2018	29/11/2018	tepat waktu
28.	Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2017	Tahunan	29/11/2018	29/11/2018	tepat waktu
29.	Neraca Arus Dana Indonesia Triwulanan 2015-2018:2	Tahunan	30/11/2018	30/11/2018	tepat waktu
30.	Neraca Pemerintahan Pusat Triwulanan 2012-2018:2	Tahunan	30/11/2018	30/11/2018	tepat waktu
31.	Indikator Ekonomi September 2018	Bulanan	30/11/2018	30/11/2018	tepat waktu
32.	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2018	Semesteran	30/11/2018	30/11/2018	tepat waktu
33.	Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2018	Semesteran	30/11/2018	30/11/2018	tepat waktu
34.	Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2018	Semesteran	30/11/2018	30/11/2018	tepat waktu
35.	Analisis Isu Terkini 2018	Tahunan	30/11/2018	30/11/2018	tepat waktu
36.	Statistik Telekomunikasi Indonesia 2017	Tahunan	30/11/2018	30/11/2018	tepat waktu
37.	Statistik Pendapatan Agustus 2018	Semesteran	30/11/2018	30/11/2018	tepat waktu
<b>DESEMBER</b>					
1.	Indikator Pertanian 2017	Tahunan	05/12/2018	05/12/2018	tepat waktu
2.	Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur 2016-2018	Tahunan	05/12/2018	belum rilis	
3.	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Desember 2018	Bulanan	05/12/2018	05/12/2018	tepat waktu
4.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor September 2018	Bulanan	06/12/2018	06/12/2018	tepat waktu
5.	Statistik Pendidikan 2018	Tahunan	06/12/2018	06/12/2018	tepat waktu
6.	Pilar Lingkungan: Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2018	Tahunan	07/12/2018	07/12/2018	tepat waktu
7.	Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018	Tahunan	07/12/2018	07/12/2018	tepat waktu
8.	Modal Sosial 2017	Tahunan	07/12/2018	belum rilis	



No.	Judul	Periode Terbit	Jadwal Rilis	Tanggal Rilis	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2018	Tahunan	07/12/2018	belum rilis	
10.	Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2018	Tahunan	07/12/2018	07/12/2018	tepat waktu
11.	Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen 2018	Tahunan	12/12/2018	12/12/2018	tepat waktu
12.	Potensi Desa 2018	Lainnya	17/12/2018	17/12/2018	tepat waktu
13.	Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015-2018	Tahunan	19/12/2018	19/12/2018	tepat waktu
14.	Statistik Penduduk Lanjut Usia 2018	Tahunan	21/12/2018	21/12/2018	tepat waktu
15.	Statistik Pemuda Indonesia 2018	Tahunan	21/12/2018	21/12/2018	tepat waktu
16.	Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro dan Indonesia Tahun 2018	Tahunan	21/12/2018	21/12/2018	tepat waktu
17.	Indeks Perilaku Anti Korupsi 2018	Tahunan	26/12/2018	26/12/2018	tepat waktu
18.	Statistik Kriminal 2018	Tahunan	26/12/2018	26/12/2018	tepat waktu
19.	Statistik Politik 2018	Tahunan	26/12/2018	26/12/2018	tepat waktu
20.	Distribusi Perdagangan Komoditi Daging Sapi di Indonesia 2018	Tahunan	28/12/2018	belum rilis	
21.	Distribusi Perdagangan Komoditi Daging Ayam Ras di Indonesia 2018	Tahunan	28/12/2018	belum rilis	
22.	Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2013-2017	Tahunan	28/12/2018	28/12/2018	tepat waktu
23.	Distribusi Perdagangan Komoditi Beras di Indonesia 2018	Tahunan	28/12/2018	belum rilis	
24.	Distribusi Perdagangan Komoditi Bawang merah di Indonesia 2018	Tahunan	28/12/2018	belum rilis	
25.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Oktober 2018	Bulanan	28/12/2018	28/12/2018	tepat waktu
26.	Katalog Publikasi BPS 2018	Tahunan	28/12/2018	28/12/2018	tepat waktu
27.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Oktober 2018	Bulanan	28/12/2018	28/12/2018	tepat waktu
28.	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Oktober 2018	Bulanan	28/12/2018	28/12/2018	tepat waktu
29.	Indikator Ekonomi Oktober 2018	Bulanan	28/12/2018	28/12/2018	tepat waktu
30.	Distribusi Perdagangan Komoditi Cabai Merah di Indonesia 2018	Tahunan	28/12/2018	belum rilis	



## LAMPIRAN 8

### Pelaksanaan Press Release Tahun 2018

No (1)	Tanggal (2)	Tempat (3)	Jam (4)	Press Release (5)
1	2 Januari	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Desember 2017</li> <li>(2) Indeks Harga Perdagangan Besar Desember 2017</li> <li>(3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Desember 2017</li> <li>(4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi November 2017</li> <li>(5) Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017</li> <li>(6) Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2017</li> </ul>
2	15 Januari	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2017</li> <li>(2) Perkembangan Upah Pekerja/Buruh Desember 2017</li> <li>(3) Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Desember 2017</li> </ul>
3	1 Februari	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Januari 2018</li> <li>(2) Indeks harga Perdagangan Besar Januari 2018</li> <li>(3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Januari 2018</li> <li>(4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Desember 2017</li> <li>(5) Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Triwulan IV-2017</li> <li>(6) Perkembangan Indeks Harga Produsen Triwulan IV-2017</li> </ul>
4	5 Februari	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017</li> </ul>

No (1)	Tanggal (2)	Tempat (3)	Jam (4)	Press Release (5)
				(2) Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV-2017
5	15 Februari	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Januari 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja /Buruh Januari 2018 (3) Perdagangan Komoditas Strategis 2017
6	1 Maret	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Februari 2018 (2) Indeks Harga Perdagangan Besar Februari 2018 (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Februari 2018 (4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Januari 2018
7	15 Maret	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Februari 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja /Buruh Februari 2018
8	2 April	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Maret 2018 (2) Indeks harga Perdagangan Besar Maret 2018 (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Maret 2018 (4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Februari 2018
9	16 April	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Maret 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja/Buruh Maret 2018 (3) Indeks Pembangunan Manusia 2017
10	2 Mei	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi April 2018 (2) Indeks Harga Perdagangan Besar April 2018 (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah April 2018 (4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Maret 2018

No (1)	Tanggal (2)	Tempat (3)	Jam (4)	Press Release (5)
				(5) Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Triwulan I-2018 (6) Perkembangan Indeks Harga Produsen Triwulan I-2018
11	7 Mei	Gd.3 Lt. I	11.00 WIB	(1) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2018 (2) Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I-2018 (3) Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018
12	15 Mei	Gd.3 Lt. I	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia April 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja/Buruh April 2018
13	4 Juni	Gd.3 Lt. I	11.00 WIB	(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Mei 2018 (2) Indeks Harga Perdagangan Besar Mei 2018 (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Mei 2018 (4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi April 2018
14	25 Juni	Gd.3 Lt. I	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Mei 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja/Buruh Mei 2018
15	2 Juli	Gd.3 Lt. I	11.00 WIB	(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Juni 2018 (2) Indeks Harga Perdagangan Besar Juni 2018 (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Juni 2018 (4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Mei 2018
16	16 Juli	Gd.3 Lt. I	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Juni 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja/Buruh Juni 2018 (3) Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018 (4) Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2018

No (1)	Tanggal (2)	Tempat (3)	Jam (4)	Press Release (5)
17	1 Agustus	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Juli 2018 (2) Indeks Harga Perdagangan Besar Juli 2018 (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Juli 2018 (4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Juni 2018 (5) Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Triwulan II-2018 (6) Perkembangan Indeks Harga Produsen Triwulan II-2018
18	6 Agustus	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2018 (2) Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan II-2018
19	15 Agustus	Gd.1 Lt. 3	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Juli 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja/Buruh Juli 2018 (3) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)2017
20	3 September	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Agustus 2018 (2) Indeks Harga Perdagangan Besar Agustus 2018 (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Agustus 2018 (4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Juli 2018
21	17 September	Gd. 3 Lt 1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Agustus 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja/Buruh Agustus 2018 (3) Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia (IPAK) 2018
22	1 Oktober	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi September 2018 (2) Indeks Harga Perdagangan Besar September 2018 (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Septemberr 2018

No (1)	Tanggal (2)	Tempat (3)	Jam (4)	Press Release (5)
				(4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Agustus 2018
23	15 Oktober	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia September 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja/Buruh September 2018
24	24 Oktober	Gd.3 Lt.1	10.00 WIB	Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2018 (Perbaikan Metodologi Perhitungan Data Produksi Beras dengan Metode Kerangka Sampel Area )
25	1 November	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Oktober 2018 (2) Indeks Harga Perdagangan Besar Oktober 2018 (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah Oktober 2018 (4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi September 2018 (5) Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Triwulan III-2018 (6) Perkembangan Indeks Harga Produsen Triwulan III-2018
26	5 November	Gd.3 LT.1	11.00 WIB	(1) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2018 (2) Indeks Tendensi Bismis dan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III-2018 (3) Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018
27	15 November	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Oktober 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja/Buruh Oktober 2018
28	22 November	Gd.3 Lt.1	15.00 WIB	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia Tahun 2018
29	3 Desember	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi November 2018 (2) Indeks Harga Perdagangan Besar November 2018 (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Gabah November 2018

No (1)	Tanggal (2)	Tempat (3)	Jam (4)	Press Release (5)
				(4) Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Oktober 2018
30	10 Desember	Gd.1 Lt.9	09.00 WIB	Rilis Hasil Pendataan Potensi desa (PODES) 2018
31	17 Desember	Gd.3 Lt.1	11.00 WIB	(1) Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia November 2018 (2) Perkembangan Upah Pekerja/Buruh November 2018 (3) Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 2017



## LAMPIRAN 9

# Pernyataan Perubahan Target PK Terhadap Renstra



**BADAN PUSAT STATISTIK**

### SURAT PERNYATAAN

Memperhatikan kemampuan BPS dalam pencapaian target kinerja tahun 2018 dan hasil evaluasi tahun 2017, maka dengan ini kami menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara Target Kinerja 2018 dalam Renstra BPS 2015-2019 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Data target kinerja dalam perjanjian kinerja bersumber dari tiap *Subject Matter* yang bertanggung jawab atas pencapaian indikator kinerja masing-masing.

Indikator (1)	Renstra 2018 (2)	PK 2018 (3)	Keterangan (4)
Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	18	21	Penyesuaian target, sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan data BPS
Jumlah Publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	238	198	Penyesuaian target, karena ada penggabungan beberapa publikasi/laporan
Jumlah release data statistik yang tepat waktu	31	28	Sebagian data sudah dianggap rutin sehingga tidak perlu rilis secara terpisah
Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	35	23	Penyesuaian target, karena ada pergeseran jadwal kegiatan
Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei	100	97	Penyesuaian target, karena kegiatan BPS melibatkan responden yang sangat banyak sehingga tingkat non respon tidak bisa dihindari.
Jumlah aktivitas statistik mendeklarasikan penjaminan kualitas	11	4	Penyesuaian target, karena masih terus membangun standar baku penjaminan kualitas
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i>	1.300.000	1.400.000	Penyesuaian target, karena jumlah pengunjung eksternal <i>website</i> BPS semakin banyak
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	46	30	Banyak konsumen data yang menggunakan data BPS dari pihak lain (mengutip) tetapi tidak mengetahui bahwa data tersebut adalah data dari BPS
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	80	86	Penyesuaian target, karena BPS berupaya mempermudah akses data baik melalui <i>website</i> maupun Pusat Layanan Statistik Terpadu
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	72	70	Penyesuaian target, karena ada perubahan kebijakan pengurangan kegiatan <i>training</i> di bidang kepegawaian
Persentase K/L yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan Pranata Komputer	72	70	Penyesuaian target, karena masih perlu sosialisasi yang lebih masif tentang jabatan fungsional statistisi/pranata komputer di K/L lain
Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer K/L	32	30	Penyesuaian target, karena masih perlu peningkatan
Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	81	78	Penyesuaian target, karena belum dapat melaksanakan sebagian rekomendasi Menpan & RB seperti perbaikan <i>cascading</i> indikator.
Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	77	76	Penyesuaian target, karena penilaian individu belum didasarkan pada kinerja organisasi serta pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	90	84	Penyesuaian target, karena pelatihan SAKIP baru dilaksanakan untuk seluruh satker di tahun 2018
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	90	80	Penyesuaian target, karena beberapa sarana dan prasarana BPS masih perlu ditingkatkan

Jakarta, 1 Februari 2018  
 KEPALA BIREBINA PROGRAM  
  
 BUYUNG AIRLANGGA

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003 Jakarta 10010, Telp : (021) 3841185, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046  
 Homepage : <http://www.bps.go.id> Email : [bps@bps.go.id](mailto:bps@bps.go.id)





# LAMPIRAN 10

## Jumlah Pejabat Fungsional Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Jabatan Fungsional	Terampil					Ahli					Total
	Pelaksana Pemula	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Sub Total	Pertama	Muda	Madya	Utama	Sub Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Analisis Kepegawaian			3	1		12	13	2			31
Arsiparis		3	4								7
Auditor			2			11	32	4			49
Dokter								1			1
Dokter Gigi							1				1
Dosen *						21	21	12			54
Peneliti							1	2	1		4
Penerjemah							1				1
Penyuluh Hukum						11	3				14
Perawat							1				1
Perawat Gigi				1							1
Perencana											
Pranata Humas				1			1				2
Pranata Komputer	10	12	3			34	1	3			118
Pustakawan			3			1	2				6
Statistisi		564	829	570		1.149	603	48	1		3.764
Widyaiswara						1	11	99	1		22
Jumlah		577	853	576		1.240	746	81	3		4.076

\*) Nama Jabatan Dosen :

- Pertama : Asisten Ahli
- Muda : Lektor
- Madya : Lektor Kepala



## Jumlah Pejabat Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di Kementerian/Lembaga/Instansi Tahun 2018

No	Nama Instansi	Fungsional	
		Pranata Komputer	Statistisi
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A</b>	<b>Badan Pusat Statistik</b>	<b>118</b>	<b>3.764</b>
<b>B</b>	<b>Kementerian/Lembaga/SKPD Non BPS</b>	<b>2.163</b>	<b>130</b>
1.	Arsip Nasional Republik Indonesia	22	
2.	Badan Informasi Geospasial	5	1
3.	Badan Kepegawaian Negara	110	3
4.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	46	6
5.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	14	4
6.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	8	
7.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	66	
8.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	52	
9.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	20	
10.	Badan SAR Nasional (Pencarian dan Pertolongan)	13	1
11.	Badan Siber dan Sandi Negara	4	
12.	Badan Standardisasi Nasional	8	
13.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	
14.	Kementerian Agama	105	11
15.	Kementerian Dalam Negeri	33	
16.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	15	3
17.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	26	
18.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	9	24
19.	Kementerian Kesehatan	56	6
20.	Kementerian Ketenagakerjaan	43	
21.	Kementerian Keuangan	302	



No	Nama Instansi	Fungsional	
		Pranata Komputer	Statistisi
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	32	3
23.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53	
24.	Kementerian Pariwisata	23	4
25.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	23	
26.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	20	2
27.	Kementerian Perdagangan	53	14
28.	Kementerian Perhubungan	62	3
29.	Kementerian Perindustrian	10	1
30.	Kementerian Pertahanan	41	
31.	Kementerian Pertanian	20	18
32.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	46	
33.	Kementerian Sekretariat Negara	16	
34.	Kementerian Sosial	60	2
35.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3	
36.	Lembaga Administrasi Negara	1	
37.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	44	
38.	Lembaga Ketahanan Nasional	6	
39.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	10	
40.	Mahkamah Agung	60	
41.	Mahkamah Konstitusi	11	
42.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	14	
43.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	7	
44.	Sekretariat Jenderal DPP	2	
45.	Sekretariat Jenderal DPR	20	
46.	Pemerintah Daerah Tingkat I/II	549	24
<b>JUMLAH</b>		<b>2.281</b>	<b>3.894</b>



## LAMPIRAN 1 1

### Jumlah Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pusat</b>					
Kepala Badan Pusat Statistik	1				1
Sekretariat Utama	1	85	166	125	377
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	6	95	152	30	283
Deputi Bidang Statistik Sosial	5	73	81	11	170
Deputi Bidang Statistik Produksi	2	45	81	20	148
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	2	75	97	42	216
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	4	56	81	7	148
Inspektorat Utama	-	34	44	8	86
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	4	30	21	17	72
Politeknik Statistika STIS	16	66	13	14	109
<b>Daerah*</b>					
BPS Provinsi Aceh	1	30	301	186	518
BPS Provinsi Sumatera Utara	1	127	349	288	765
BPS Provinsi Sumatera Barat	3	59	219	147	428
BPS Provinsi Riau		41	181	132	354
BPS Provinsi Jambi		41	138	113	292
BPS Provinsi Sumatera Selatan		78	213	129	420
BPS Provinsi Bengkulu		46	149	49	244
BPS Provinsi Lampung		51	194	170	415
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		26	111	37	174
BPS Provinsi Kepulauan Riau		24	104	64	192

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII ke bawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi DKI Jakarta		46	86	84	216
BPS Provinsi Jawa Barat		122	433	428	983
BPS Provinsi Jawa Tengah		225	502	576	1.303
BPS Provinsi D I Yogyakarta	1	86	106	62	255
BPS Provinsi Jawa Timur	2	210	448	452	1.112
BPS Provinsi Banten		47	126	137	310
BPS Provinsi Bali	2	47	122	77	248
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat		37	191	99	327
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur		30	342	158	530
BPS Provinsi Kalimantan Barat	1	45	216	114	376
BPS Provinsi Kalimantan Tengah		30	234	73	337
BPS Provinsi Kalimantan Selatan		35	208	148	391
BPS Provinsi Kalimantan Timur	1	38	180	66	285
BPS Provinsi Kalimantan Utara		9	68	25	102
BPS Provinsi Sulawesi Utara	1	29	202	93	325
BPS Provinsi Sulawesi Tengah		29	204	100	333
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	2	48	344	237	631
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara		38	196	177	411
BPS Provinsi Gorontalo		13	130	46	189
BPS Provinsi Sulawesi Barat		25	103	73	201
BPS Provinsi Maluku		19	166	96	281
BPS Provinsi Maluku Utara		19	150	76	245
BPS Provinsi Papua Barat		20	185	54	259
BPS Provinsi Papua		24	315	133	472
<b>Jumlah</b>	56	2.353	7.952	5.173	15.534

\* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

## Jumlah Pegawai BPS Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2018

SATUAN KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pusat</b>					
Kepala Badan Pusat Statistik	1				1
Sekretariat Utama	52	286	39		377
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	34	246	3		283
Deputi Bidang Statistik Sosial	41	127	2		170
Deputi Bidang Statistik Produksi	30	117	1		148
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	38	173	5		216
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	38	110			148
Inspektorat Utama	10	75	1		86
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	23	46	3		72
Politeknik Statistika STIS	34	71	4		109
<b>Daerah*</b>					
BPS Provinsi Aceh	35	358	124	1	518
BPS Provinsi Sumatera Utara	77	536	149	3	765
BPS Provinsi Sumatera Barat	42	311	75		428
BPS Provinsi Riau	27	239	88		354
BPS Provinsi Jambi	36	204	52		292
BPS Provinsi Sumatera Selatan	39	297	84		420
BPS Provinsi Bengkulu	28	193	22	1	244
BPS Provinsi Lampung	43	283	89		415
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19	134	21		174
BPS Provinsi Kepulauan Riau	19	135	38		192
BPS Provinsi DKI Jakarta	38	153	25		216
BPS Provinsi Jawa Barat	98	703	175	7	983
BPS Provinsi Jawa Tengah	141	886	272	4	1303

SATUAN KERJA (1)	COLONGAN				JUMLAH (6)
	IV (2)	III (3)	II (4)	I (5)	
BPS Provinsi D I Yogyakarta	48	183	24		255
BPS Provinsi Jawa Timur	158	729	222	3	1112
BPS Provinsi Banten	41	180	89		310
BPS Provinsi Bali	29	173	43	3	248
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	31	238	58		327
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	31	394	98	7	530
BPS Provinsi Kalimantan Barat	41	287	46	2	376
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	22	278	37		337
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	29	281	81		391
BPS Provinsi Kalimantan Timur	35	221	29		285
BPS Provinsi Kalimantan Utara	10	74	18		102
BPS Provinsi Sulawesi Utara	23	241	60	1	325
BPS Provinsi Sulawesi Tengah	27	232	73	1	333
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	53	412	163	3	631
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	22	279	110		411
BPS Provinsi Gorontalo	13	144	31	1	189
BPS Provinsi Sulawesi Barat	15	129	57		201
BPS Provinsi Maluku	20	183	78		281
BPS Provinsi Maluku Utara	17	159	69		245
BPS Provinsi Papua Barat	17	203	39		259
BPS Provinsi Papua	27	338	106	1	472
<b>Jumlah</b>	1.652	11.041	2.803	38	15.534

\* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

## Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselon di BPS Tahun 2018

SATUAN KERJA	JABATAN STRUKTURAL				JUMLAH
	ES I	ES II	ES III	ES IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pusat</b>					
Kepala Badan Pusat Statistik	1				1
Sekretariat Utama	1	5	19	50	75
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	1	3	12	35	51
Deputi Bidang Statistik Sosial	1	3	11	28	43
Deputi Bidang Statistik Produksi	1	2	10	30	43
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	1	3	11	33	48
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	1	2	12	34	49
Inspektorat Utama	1	3	1	3	8
Pusat Pendidikan dan Pelatihan		1	3	6	10
Politeknik Statistika STIS			2	5	7
<b>Daerah*</b>					
BPS Provinsi Aceh		1	29	101	131
BPS Provinsi Sumatera Utara		1	37	197	235
BPS Provinsi Sumatera Barat		1	24	129	154
BPS Provinsi Riau		1	18	75	94
BPS Provinsi Jambi		1	17	78	96
BPS Provinsi Sumatera Selatan		1	21	101	123
BPS Provinsi Bengkulu		1	16	72	89
BPS Provinsi Lampung		1	20	99	120
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1	13	55	69
BPS Provinsi Kepulauan Riau		1	13	46	60
BPS Provinsi DKI Jakarta		1	12	56	69
BPS Provinsi Jawa Barat		1	31	172	204
BPS Provinsi Jawa Tengah		1	41	229	271

SATUAN KERJA	JABATAN STRUKTURAL				JUMLAH
	ES I	ES II	ES III	ES IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi D I Yogyakarta		1	11	48	60
BPS Provinsi Jawa Timur		1	44	246	291
BPS Provinsi Banten		1	14	65	80
BPS Provinsi Bali		1	15	72	88
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat		1	16	76	93
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur		1	25	100	126
BPS Provinsi Kalimantan Barat		1	20	70	91
BPS Provinsi Kalimantan Tengah		1	20	75	96
BPS Provinsi Kalimantan Selatan		1	19	86	106
BPS Provinsi Kalimantan Timur		1	14	68	83
BPS Provinsi Kalimantan Utara		1	10	20	31
BPS Provinsi Sulawesi Utara		1	17	79	97
BPS Provinsi Sulawesi Tengah		1	17	72	90
BPS Provinsi Sulawesi Selatan		1	30	163	194
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara		1	19	86	106
BPS Provinsi Gorontalo		1	12	43	56
BPS Provinsi Sulawesi Barat		1	11	37	49
BPS Provinsi Maluku		1	16	62	79
BPS Provinsi Maluku Utara		1	15	46	62
BPS Provinsi Papua Barat		1	15	62	78
BPS Provinsi Papua		1	27	93	121
<b>Jumlah</b>	8	56	760	3.303	4.127

\* Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya

## LAMPIRAN 12

### Prestasi yang diraih BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2018

No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Provinsi Aceh</b>						
1.	BPS Provinsi Aceh	Koordinator Wilayah dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I TA 2018 Katagori Pagu > Rp. 100 Milyar s/d Rp. 1 Triliun	Kementerian Keuangan RI Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh	Wilayah Kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh	1	Plakat
2.	BPS Kabupaten Aceh Tengah	Satuan Kerja Peringkat Terbaik Kinerja Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Periode Semester I Tahun Anggaran 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Aceh KPPN Takengon	Wilayah Kerja KPPN Takengon	2	Piagam
3.	BPS Kabupaten Aceh Tenggara	Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Periode Semester I Tahun Anggaran 2018	Kementerian Keuangan RI Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh KPPN Kutacane	Wilayah Kerja KPPN Kutacane	2	Piagam
4.	BPS Kabupaten Aceh Selatan	Satuan Kerja Terbaik Katagori Satuan Kerja dengan Pagu Belanja Menengah	Kementerian Keuangan RI Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh KPPN Tapaktuan	Wilayah Kerja KPPN Tapaktuan	1	Piagam
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>						
1.	BPS Provinsi Sumatera Utara	Satuan Kerja Terbaik dalam Pengelolaan dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2018 Kategori Satker dengan Pagu Diatas 10 Miliar	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Utara	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara	5	Piagam
2.	BPS Provinsi Sumatera Utara	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Terbaik untuk Kategori Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Semester II Tahun 2017	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Utara	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara	5	Piagam
3.	BPS Kabupaten Tapanuli Selatan	Satuan Kerja Terbaik Pelaksana Anggaran Tahun 2018 sampai dengan Agustus 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara KPPN Padangsidimpuan	KPPN Padangsidimpuan	3	Piagam

No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	BPS Kabupaten Tapanuli Selatan	Penilaian Atas Penyampaian Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara Lingkup KPPN Padangsidimpuan Tahun 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Utara KPPN Padangsidimpuan	KPPN Padangsidimpuan	5	Piagam
5.	BPS Kabupaten Tapanuli Selatan	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Lingkup KPPN Padangsidimpuan s.d November 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara KPPN Padangsidimpuan	KPPN Padangsidimpuan	5	Piagam
6.	BPS Kabupaten Toba Samosir	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara KPPN Balige	KPPN Balige	1	Piagam
7.	BPS Kabupaten Toba Samosir	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Utara KPPN Balige	KPPN Balige	3	Piagam
8.	BPS Kabupaten Deli Serdang	Satker Berkinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi	KPPN Tebing Tinggi	1	Piagam
9.	BPS Kota Tanjung Balai	Kerjasama dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai	Pemerintah Kota Tanjungbalai	Pemerintah Kota Tanjungbalai	-	Piagam
10.	BPS Kota Medan	Nilai IKPA Tertinggi Tahun 2018 Kategori Satker dengan Pagu dibawah 10 Miliar	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Utara KPPN Medan II	KPPN Medan II	3	Piagam Penghargaan
<b>Provinsi Sumatera Barat</b>						
1.	BPS Provinsi Sumatera Barat	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Instansi Vertikal Provinsi Sumatera Barat	Komisi Informasi	Provinsi	1	Piagam
2.	BPS Provinsi Sumatera Barat	Penilaian Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tahun 2017 Untuk Kategori UAPPA-WA Besar Lingkup Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 93,31	Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat	Provinsi	3	Piagam
3.	BPS Kabupaten Padang Pariaman	Satuan Kerja Berprestasi Kategori Satker Sedang	KPPN Padang	Wilayah KPPN Padang	6	Piagam
4.	BPS Kota Bukittinggi	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kemenpan RB	Nasional	-	Piagam

No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BPS Kabupaten Pasaman	Terbaik I Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat satker (Non Madrasah) Semester I Tahun Anggaran 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara	Wilayah Kerja KPPN Lubuk Sikaping	1	Piagam
6.	BPS Kab. Pesisir Selatan	Peringkat 1 dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan kategori Pagu Anggaran di atas Rp.3 Milyar Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan.	KPPN Painan	Kantor Pelayanan perbendaharaan negara painan	1	Piagam
7.	BPS Kota Padang Panjang	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Triwulan III Tahun 2018 Kategori Pagu Belanja Modal di bawah Rp.20 Milyar Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat	Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat	Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat	1	Piagam
<b>Provinsi Riau</b>						
1.	BPS Provinsi Riau	Kementerian Negara/Lembaga dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki lebih dari 3 Satuan Kerja  Pengelola Aset Terbaik selaku Koordinator Wilayah di Provinsi Riau	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Riau, Tanggal 5 Februari 2018  Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Tanggal 29 November 2018	Wilayah Kerja KPPN Pekanbaru  Wilayah Kerja DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau	1  3	Piagam  Piagam
2.	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, kategori Pagu dibawah 6 Milyar	KPPN Rengat, Tanggal 20 Desember 2018	Kabupaten	3	Piagam
3.	BPS Kabupaten Indragiri Hilir	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran semester I Tahun 2018, kategori Pagu diatas 6 Milyar  Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, kategori Pagu diatas 6 Milyar	KPPN Rengat  KPPN Rengat, Tanggal 20 Desember 2018	Kabupaten  Kabupaten	3  2	Piagam  Piagam
4.	BPS Kabupaten Rokan Hilir	Satuan Kerja Pengelola BMN Terbaik	KPKNL Dumai,	Kabupaten	1	Piagam
<b>Provinsi Jambi</b>						
1.	BPS Provinsi Jambi	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan	Kementrian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam

No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-1 Tahun Anggaran 2018.				
2.	BPS Kabupaten Kerinci	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-1 Tahun Anggaran 2018.	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam
3.	BPS Kabupaten Merangin	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-1 Tahun Anggaran 2018.	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam
4.	BPS Kabupaten Sarolangun	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-1 Tahun Anggaran 2018.	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam
5.	BPS Kabupaten Batanghari	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-1 Tahun Anggaran 2018.	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam
6.	BPS Kabupaten Muaro Jambi	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-1 Tahun Anggaran 2018.	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam
7.	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam

No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Semester-I Tahun Anggaran 2018.				
8.	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-I Tahun Anggaran 2018.	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam
9.	BPS Kabupaten Tebo	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-I Tahun Anggaran 2018.	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam
10.	BPS Kabupaten Bungo	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-I Tahun Anggaran 2018.	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam
11.	Kota Jambi	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-I Tahun Anggaran 2018.	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam
12.	Kota Sungaipenuh	Penghargaan atas Kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dan Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu Semester-I Tahun Anggaran 2018.	Kementerian Keuangan - KPKNL Jambi	Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel	Sangat Baik	Piagam
<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>						
1.	BPS Kota Lubuk Linggau	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Tahun 2018	Kementerian Keuangan KPPN Lubuk Linggau	KPPN Lubuk Linggau	2	Piagam
<b>Provinsi Bengkulu</b>						
1.	BPS Kota Bengkulu	Satuan Kerja Terbaik I Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Provinsi	1	Piagam



No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Kanwil Provinsi Bengkulu			
2.	BPS Kabupaten Muko-Muko	Satuan Kerja Dengan Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Bengkulu KPPN Mukomuko	Kabupaten	1	Piagam
<b>Provinsi Lampung</b>						
1.	BPS Provinsi Lampung	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II TA. 2017 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Bandar Lampung  Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Instansi Vertikal Provinsi Lampung	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Lampung KPPN Bandar Lampung  Komisi Informasi Provinsi Lampung	Wilayah Kerja KPPN Bandar Lampung  Provinsi Lampung	Terbaik  4	Piagam  Piagam dan Piala
2.	BPS Kab. Lampung Barat	Stand Pameran Kreatif dan Inovatif Satuan Kerja Dengan Kualitas Laporan Keuangan Terbaik 2017	Bupati Kabupaten Lampung Barat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Lampung KPPN Liwa	Kabupaten Lampung Barat Wilayah Kerja KPPN Liwa	1 3	Piagam Piagam
3.	BPS Kabupaten Lampung Utara	Satker dengan Pengelolaan Keuangan Terbaik Semester II TA 2017	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Lampung KPPN Kota Bumi	Wilayah Kerja KPPN Kota Bumi	1	Piagam
4.	BPS Kota Bandar Lampung	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2018 Terbaik Kategori Satker Pagu Sedang	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Lampung KPPN Bandar Lampung	Wilayah Kerja KPPN Bandar Lampung	2	Piagam
5.	BPS Kota Metro	Pengelolaan BMN Terbaik	Dirjen Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Metro	Wilayah Kerja KPKNL Metro	4	Piagam Penghargaan
6.	BPS Kabupaten Lampung Timur	Penilaian IKPA Satker dengan Pagu Besar (>5.000.000.000)	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Lampung KPPN Metro	Wilayah Kerja KPPN Metro	3	Piagam dan Surat Keputusan Kepala KPPN Metro
7.	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Penilaian IKPA Satker dengan Pagu Besar (>5.000.000.000)	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Lampung KPPN Metro	Wilayah Kerja KPPN Metro	8	Piagam dan Surat Keputusan Kepala KPPN Metro
<b>Provinsi Bangka Belitung</b>						

No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I TA 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Bangka Belitung	Provinsi	1	Piagam
2.	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2017 di Lingkup Kantor Wil. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Kep. Bangka Belitung	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Bangka Belitung	Provinsi	3	Piagam
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>						
	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Riau	Komisi Informasi	Provinsi	1	Piagam
<b>Provinsi Jawa Barat</b>						
1.	BPS Kabupaten Bogor	Satuan Kerja dengan capaian kinerja pelaksanaan anggaran semester 1 tahun anggaran 2018 kategori satker pengelola pagu di bawah Rp 10.000.000.000	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor	Kabupaten	2	Piagam
2.	BPS Kabupaten Bogor	Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor Tahun 2018	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat	Kabupaten	2	Piagam
3.	BPS Kabupaten Bandung	Tanginas Award kepada Satuan Kerja Terbaik dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Rekonsiliasi Tepat waktu dan Akurat Bulan Oktober 2018 Terbaik III (Kategori DIPA Kecil)	KPPN Bandung II	Kabupaten/ Kota	3	Piagam
4.	BPS Kabupaten Garut	Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Kepatuhan Satuan Kerja Lingkup KPPN Garut dalam Rangka Pelaksanaan APBN Triwulan IV	KPPN Garut	Kabupaten	1	Piagam
5.	BPS Kabupaten Garut	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup KPPN Garut	Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	Provinsi	2	Piagam
6.	BPS Kabupaten Tasikmalaya	Satker Berkinerja Terbaik Tahun 2018 (Pagu 5 Milyar sd. 10 Milyar)	KPPN Tasikmalaya	Kabupaten	2	Piagam
7.	BPS Kabupaten Majalengka	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup KPPN Kuningan	Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	Provinsi	3	Piagam
8.	BPS Kabupaten Sumedang	Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup KPPN Sumedang	Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	Provinsi	1	Piagam
9.	BPS Kabupaten Purwakarta	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor	Kabupaten	3	Piagam



No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	BPS Kabupaten Purwakarta	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarta Tahun 2018	Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat	Provinsi	3	Piagam
11.	BPS Kota Sukabumi	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Satker Pagu Kecil	Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	Provinsi	3	Piagam
12.	BPS Kota Tasikmalaya	Satuan Kerja Berkinerja Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2018 Dengan Pagu Sedang 5 s.d. 20 Milyar	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya	Kota/kabupaten	2	Piagam
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>						
1.	BPS Provinsi Jawa Tengah	Satuan Kerja dengan Kinerja Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Terbaik	Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	2	Piagam
2.	BPS Kab. Cilacap	Customer Excellence Award Tahun 2018	KPPN Cilacap	Kab/kota	4	Piagam
3.	BPS Kab. Banjarnegara	Bendahara Terbaik se KPPN Wilayah Banjarnegara	KPPN Banjarnegara	Kab/kota	3	Piagam
4.	BPS Kab. Jepara	Satker Pengelola Rekonsiliasi dan LPJ Terbaik Semester I Tahun 2018	KPPN Kudus	Kab/kota	1	Piagam
5.	BPS Kab. Demak	Lomba Keindahan dan Kebersihan Kategori Instansi Vertikal	Pemkab Demak	Kab/kota	3	Piagam
6.	BPS Kab. Batang	Satker dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2018	KPPN Pekalongan	Kab/kota	3	Piagam
7.	BPS Kab. Brebes	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal) Tahun 2017	KPKNL Tegal	Kab/kota	1	Piagam
8.	BPS Kota Magelang	Best Performance Semester II Tahun 2018 Kategori C	KPPN Magelang	Kab/kota	3	Piagam
9.	BPS Kota Salatiga	Satker Terbaik pelaksanaan anggaran pagu di bawah 5M	KPPN Semarang	Kota	2	Piagam
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>						
1.	BPS Provinsi D.I. Yogyakarta	Hasil penilaian Laporan Keuangan K/L tingkat UAPPA-Wtahun 2017 kategori 4 sd 6 satker	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi D I Yogyakarta KPPN Yogyakarta	Wilayah Kerja Kanwil DJPB Provinsi D.I Yogyakarta	3	Piagam
2.	BPS Kab. Gunungkidul	Satuan Kerja Terbaik III Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan I 2018.	KPPN Wonosari	Wilayah Kerja KPPN Wonosari	3	Piagam
3.	BPS Kabupaten Sleman	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Bulan Agustus 2018	KPPN Yogyakarta	Wilayah KPPN Yogyakarta	4	Piagam
4.	BPS Kota Yogyakarta	Satuan Kerja Peringkat Kedua Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode bulan Agustus 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi D I Yogyakarta KPPN Yogyakarta	Wilayah Kerja KPPN Yogyakarta	2	Piagam, Kartu Prioritas Utama Pelayanan KPPN



No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Provinsi Jawa Timur</b>						
1.	BPS Kabupaten Nganjuk	Kontribusi Wajib Pajak dalam pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare	Kota	-	Piagam
2.	BPS Kabupaten Pamekasan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA. 2018 Kategori Satker dengan Pagu Kecil (sd. 7 M)	KPPN Pamekasan	Wilayah Kerja KPPN Pamekasan	3	Piagam
3.	BPS Kota Probolinggo	Satker terbaik dalam Penyampaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2018	KPPN Bondowoso	Kota Probolinggo	2	Piagam
4.	BPS Kota Madiun	Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Unit Kerja	-	Piagam
5.	BPS Kabupaten Sampang	Lomba Stan Kategori BUMN/ BUMD/Vertikal dalam Pameran Pembangunan	Kabupaten Sampang	Kabupaten Sampang	3	Piala
6.	BPS Kabupaten Lamongan	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja T.A. 2018 (Kategori Pagu Sedang)	KPPN Bojonegoro	Wilayah Kerja KPPN Bojonegoro	3	Piagam
7.	BPS Kota Malang	Satuan Kerja Terbaik Kategori B (Pagu sd. 30 M) Periode Penilaian Semester II Tahun 2018	KPPN Malang	Wilayah Kerja KPPN Malang	4	Piagam
8.	BPS Kabupaten Sumenep	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA. 2018 Kategori Satker dengan Pagu Sedang (7 sd. 20 M)	KPPN Pamekasan	Wilayah Kerja KPPN Pamekasan	3	Piagam
9.	BPS Kabupaten Situbondo	Satker terbaik dalam Penyampaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018	KPPN Bondowoso	Kabupaten Situbondo	2	Piagam
10.	BPS Kabupaten Situbondo	Satker terbaik dalam Penyampaian LPJ Bendahara Se-Kabupaten Situbondo Tahun 2018	KPPN Bondowoso	Kabupaten Situbondo	2	Piagam
11.	BPS Kabupaten Bondowoso	Satker terbaik dalam Penyampaian LPJ Bendahara Se-Kabupaten Bondowoso Tahun 2018	KPPN Bondowoso	Kabupaten Bondowoso	1	Piagam
<b>Provinsi Banten</b>						
1.	BPS Kabupaten Lebak	Bendahara Pengeluaran Terbaik Semester 2	KPPN Rangkasbitung	Kabupaten	3	Piagam
2.	BPS Kota Serang	Revaluasi Barang Milik Negara	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Wilayah Kerja KPKNL Serang	2	Piagam
3.	BPS Kabupaten Pandeglang	Pengelolaan Barang Milik negara Sub Kategori Penerbitan Persetujuan Penjualan BMN	Dirjen Kekayaan Negara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Serang	Wilayah Kerja KPKNL Serang	2	Piagam
<b>Provinsi Bali</b>						



No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BPS Kabupaten Buleleng	Satuan Kerja Berprestasi Kategori Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2018	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja	Wilayah Kerja KPPN Kab. Buleleng	3	Piagam
<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>						
1.	BPS Kabupaten Lembata	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Semester I Tahun 2018 Wilayah Pembayaran KPP Larantuka	KPPN Larantuka	Kabupaten	1	Piagam
2.	BPS Kabupaten Timor Tengah Utara	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Semester I TA. 2018	KPPN Atambua	Kabupaten	1	Piagam
		Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Triwulan III (Tiga) TA. 2018	KPPN Atambua	Kabupaten	1	Piagam
3.	BPS Kabupaten Belu	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Satuan Kerja Triwulan III TA.2018	KPPN Atambua	Kabupaten	2	Piagam
4.	BPS Kabupaten Ngada	Piagam Penghargaan Sebagai Satker Dengan Kepatuhan Penyampaian Kontrak Terbaik Keempat (4) Tahun Anggaran 2018	KPPN Ruteng	Kabupaten	4	Piagam
5.	BPS Kabupaten Manggarai Timur	Satker Dengan kepatuhan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Terbaik Keempat Tahun Anggaran 2018	KPPN Ruteng	Kabupaten	4	Piagam
		Satker Dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) Pagu 3 - 15 Milyar Terbaik kelima Tahun Anggaran 2018	KPPN Ruteng	Kabupaten	5	Piagam
<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>						
1.	BPS Kabupaten Lamandau	Satuan Kerja Dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan Terbaik Semester II TA. 2017 Lingkup Kabupaten Lamandau	KPPN Pangkalan Bun	Kabupaten	Terbaik	Piagam
2.	BPS Kabupaten Sukamara	Satuan Kerja Dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan Terbaik Semester I TA. 2017 Lingkup Kabupaten Sukamara	KPPN Pangkalan Bun	Kabupaten	Terbaik	Piagam
3.	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2017 untuk Kategori satker yang mengelola Pagu DIPA 5 - 20 Milyar	KPPN Palangkaraya	Wilayah Kerja KPPN Palangkaraya	3	Piagam
4.	BPS Kabupaten Pulang Pisau	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017	Kemenkeu RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	Terbaik 1	Piagam
5.	BPS Kabupaten Gunung Mas	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017	Kemenkeu RI Direktorat Jenderal	Provinsi	Terbaik 3	Piagam

No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Perbendaharaan Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah			
<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>						
1.	BPS Kabupaten Banjar, Prov Kalsel	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II TA. 2017	KPPN Banjarmasin	Wilayah Kerja KPPN Banjarmasin	I	Piagam
2.	BPS Kabupaten Kotabaru	Satuan Kinerja Dengan Pelaksanaan Anggaran Kepatuhan dalam Revolving dan/ atau Pertanggung jawaban TUP, Penyelesaian Tagihan dan Penyampaian Data Kontrak sesuai Ketentuan TA. 2017 Wilayah Kabupaten Kotabaru	KPPN Kotabaru	Kabupaten	Terbaik II	Piagam
3.	BPS Kabupaten Banjar	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II TA. 2017 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Banjarmasin untuk kategori PAGU di bawah 10 miliar	Kemenkeu RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi	Terbaik I	Piagam
4.	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulanan III TA. 2017 Lingkup Wilayah Kerja KPPN Kotabaru	Kemenkeu RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi	Terbaik II	Piagam
			KPPN Kotabaru	Kabupaten	Terbaik III	Piagam
<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>						
1.	BPS Kabupaten Berau	Penilaian 151ai katas Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2017 Kategori Penyerapan Anggaran Belanja Modal	Kemenkeu RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	Baik	Plakat
2.	BPS Kabupaten Kutai Timur	Peserta Kegiatan Pameran "PEKAN RAYA KUTIM EXPO 2018"	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur	Kabupaten	-	Sertifikat
<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>						
1.	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Peringkat II Kategori K/L Besar (Jumlah Satker Diatas 3) atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Lingkup Provinsi Sulawesi Utara	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	Kanwil DJPB Prov. Sulawesi Utara	2	Piagam
2.	BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe	Satker Terbaik II Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Wilayah Kerja KPPN Tahuna	2	Piagam

No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2018	Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara			
3.	BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe	Peringkat I Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2018 Lingkup KPPN Tahuna Kategori Pengelola Pagu dibawah Rp 6 Miliar	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara	Wilayah Kerja KPPN Tahuna	1	Piagam
4.	BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe	Terbaik II Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2018	Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahuna	Wilayah Kerja KPPN Tahuna	2	Piagam
<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>						
1.	BPS Prov. Sulawesi Tengah	Lomba kebersihan dan keindahan kantor kategori Lembaga Vertikal / Kementerian dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-73 tingkat provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018	Pemprov Sulawesi Tengah	Provinsi	Juara umum	Piagam
2.	BPS Prov. Sulawesi Tengah	Pengelolaan dan Wasdal Barang Milik Negara	Kanwil DJKN Sulteng, Gorontalo, Maluku Utara	Wilayah Kerja DJKN Sulteng, Gorontalo, Maluku Utara	3	Piagam
3.	BPS Kabupaten Tojo Una Una	Kinerja pelaksanaan anggaran semester I tahun 2018 wilayah pembayaran KPPN Poso	KPPN Poso	Kabupaten	2	Piagam
<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>						
1.	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	Kontribusi dalam Pembangunan Sulawesi Selatan 2008-2018	Pemprov Sulawesi Selatan	Provinsi	-	Piagam
2.	BPS. Kabupaten Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan	Kinerja pelaksanaan Anggaran Tahun 2017	Kanwil DJPB Sulawesi Selatan	Wilayah Kerja DJPB Sulawesi Selatan	1	Piagam
<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>						
1.	BPS. Provinsi Sulawesi Tenggara	Penilaian Laporan Keuangan UAPPAW	Kanwil DJPB Sulawesi Tenggara	provinsi	2	Piagam
<b>Provinsi Gorontalo</b>						
1.	BPS Prov. Gorontalo	Penataan dan Sertifikasi Barang Milik Negara	Kanwil DJKN Sulteng, Gorontalo, Maluku Utara	Wilayah Kerja DJKN Sulteng, Gorontalo, Maluku Utara	2	Piagam
2.	BPS Kabupaten Pohuwato	Treasury Awards 2018 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Terbaik	DJPb Kanwil Gorontalo	Wilayah Kerja DJPB Kanwil Gorontalo	3	Piala
<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>						

No	Satker BPS	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Level	Peringkat	Bentuk Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BPS Kab Majene, Prov. Sulawesi Barat	Pengelolaan Keuangan Satker TA 2017	KPPN Majene	Wilayah Kerja KPPN Majene	2	Piagam
2.	BPS Kab Mamasa, Prov. Sulawesi Barat	Pengelolaan Keuangan Satker TA 2017	KPPN Mamasa	Wilayah Kerja KPPN Mamasa	1	Piagam
<b>Provinsi Maluku</b>						
1.	BPS Provinsi Maluku	Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 Kategori Wilayah Kerja Besar (10 Satker atau lebih)	Kanwil Ditjen Provinsi Maluku	Provinsi	1	Piagam
2.	BPS Kabupaten Maluku Barat Daya	Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Periode Semester I Tahun Anggaran 2018  Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018 dengan angka capaian IKPA Periode Agustus 2018 sebesar 99,34 Pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA (SIAP-SAI) yang benar dan tepat waktu Triwulan III  Satker yang mengajukan LPJ Bulanan tepat waktu dan akurat Triwulan III	KPPN Saumlaki	Kabupaten	2	Piagam
			KPPN Saumlaki	Kabupaten	1	Plakat
			KPPN Saumlaki	Kabupaten	-	Plakat
			KPPN Saumlaki	Kabupaten	-	Plakat
<b>Provinsi Maluku Utara</b>						
1.	BPS Kabupaten Halmahera Utara	Satker Terbaik I semester I di Lingkup Pembayaran KPPN Tobelo Tahun 2018	KPPN Tobelo	Wilayah Kerja KPPN Tobelo	1	Piagam
2.	BPS Kabupaten Halmahera Timur	Satker Terbaik III semester I di Lingkup Pembayaran KPPN Tobelo Tahun 2018	KPPN Tobelo	Wilayah Kerja KPPN Tobelo	3	Piagam
3.	BPS Provinsi Maluku Utara	Satker Terbaik Pertama Penyaji Laporan Keuangan Tahun 2017 Kategori Wilayah kerja UAPPA-W Sedang (5 s.d 10 Satker)	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara	Wilayah Provinsi Maluku Utara	1	Piagam
<b>Provinsi Papua Barat</b>						
1.	BPS Kabupaten Fakfak, Prov. Papua Barat	Penyampaian Laporan Keuangan Satker Tahun 2017	KPPN Fakfak	Wilayah Kerja KPPN Fakfak	Terbaik	Piagam



# LAMPIRAN 13

## Pemberitaan Tentang Angka Produksi Padi BPS RI Tahun 2018



<https://www.bps.go.id/news/2018/10/24/245/jk-sampaikan-hasil-ksa.html>

Diunduh tanggal 23 Januari 2019



## Polemik Data Beras, Jokowi Ikut Laporan BPS



Septian Deny  
24 Okt 2018, 15:44 WIB



Share  
15



Presiden Joko Widodo di Gudang Beras Bulog, Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

**Liputan6.com, Jakarta** Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan stok dan panen beras. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan data terkait komoditas pangan tersebut.

Dia menyatakan, sejak lama data yang ada terkait beras memang tidak akurat. BPS kemudian diminta untuk memperbaiki datanya sehingga tidak lagi terjadi kerancuan.

### BACA JUGA:

Selalu Muncul Polemik, Pemerintah Wacanakan Amnesti Data Beras

Menko Darmin: Produksi Beras Tahun Ini 31 Persen di Bawah Target

Harga Beras Dipastikan Stabil Hingga Akhir Tahun

"Data beras kan sudah disampaikan oleh BPS. Itu sudah sejak 1997 itu memang enggak benar datanya," ujar dia di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/10/2018).

Namun dengan upaya perbaikan data yang dilakukan BPS, Jokowi menyatakan pemerintah akan menjadikan **data beras** tersebut sebagai acuan. Dan semua instansi pemerintah akan berpegang pada data tersebut agar tidak lagi ada perbedaan.

"Ini kita sudah setahun yan lalu BPS menyampaikan ke kita, dan ini yang kita mau betulkan ya sudah pakai itu. (Pakai data BPS) Ya iya dong, semua pakai, semua kementerian," tandas dia.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3675365/polemik-data-beras-jokowi-ikut-laporan-bps>

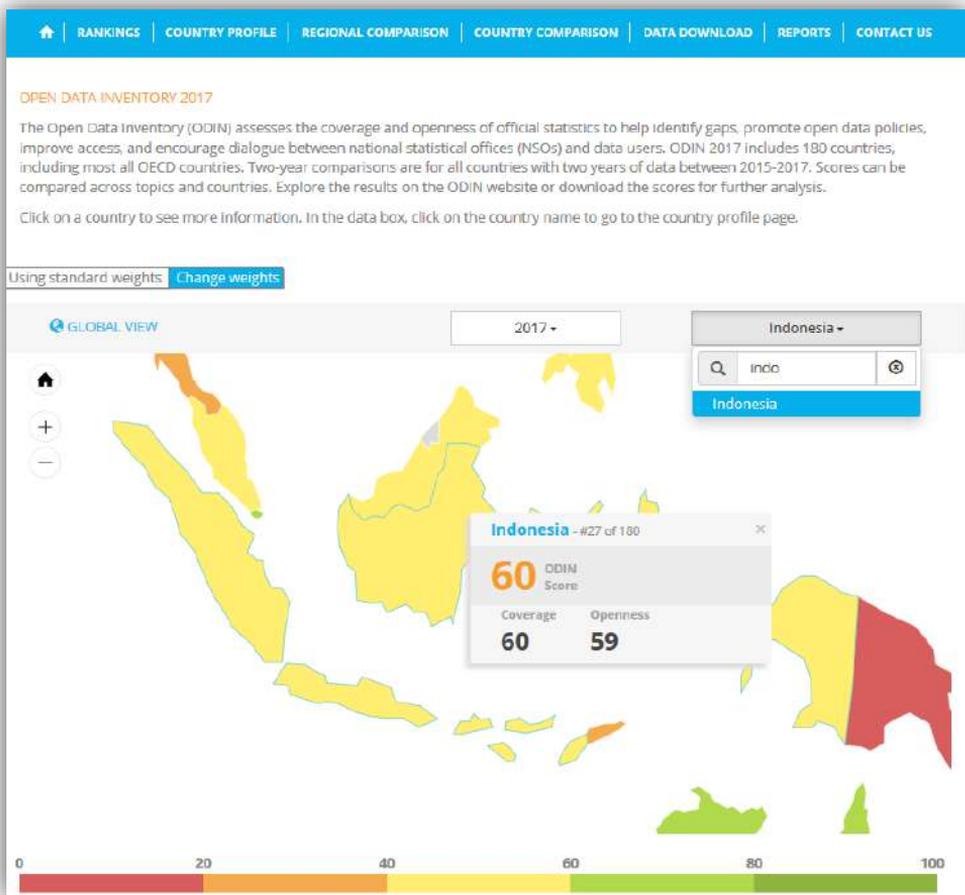
Diunduh tanggal 23 Januari 2018



# LAMPIRAN 14

## Penilaian dari ODW terhadap Official Statistics Dunia

<https://opendatawatch.com/?=ODIN>





# LAMPIRAN 15

## Penghargaan Penghematan Energi





# LAMPIRAN 16

## Pernyataan Telah Di Reviu



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BADAN PUSAT STATISTIK**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pusat Statistik untuk tahun 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pusat Statistik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2019

Inspektur Utama



*Drs. Akhmad Jaefani, M. Si*  
196306211986011001



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta-10710

Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021)3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> Email : [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)